

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Makassar merupakan ibukota provinsi Sulawesi Selatan yang dikenal sebagai salah satu kota besar dan metropolitan di Indonesia dengan jumlah penduduk yang mencapai 1,7 juta penduduk (BPS, 2015) dan luas wilayah sebesar 175,8 km². Meningkatnya pembangunan gedung-gedung baru dan padatnya penduduk dengan tingkat aktivitas penduduk yang cukup tinggi membuat kebutuhan akan penggunaan ruang publik sebagai pendukung aktifitas masyarakat juga tidak terhindarkan.

Ruang publik merupakan suatu tempat yang dapat menunjukkan perletakan sebuah objek, yang harus dapat diakses secara fisik oleh masyarakat umum yaitu dapat berupa taman, lapangan, bangunan, pasar, tempat ibadah, trotoar, dan lain-lain (Paulus, 2007). Salah satu ruang terbuka kawasan perkotaan dalam jenis pantai yang terkenal dan banyak dikunjungi oleh masyarakat kota makassar yaitu Anjungan Pantai Losari.

Fenomena yang terjadi bahwa isu tentang ketersediaan aksesibilitas yang ada di kawasan Anjungan Pantai Losari saat ini tampak belum aksesibel bagi difabel. Kenyataannya bahwa berbagai hambatan arsitektural pada bangunan dan fasilitas-fasilitas yang disediakan bagi kepentingan umum ini tidak selalu mudah atau bahkan sering tidak memungkinkan untuk diakses bagi difabel. Dengan demikian keadaan ini mengakibatkan diskriminasi dimana difabel tidak dapat memperoleh kesamaan hak dalam menikmati fasilitas publik.

Difabel merupakan terjemahan dari kata Bahasa Inggris yaitu *diffable* yang kemudian di-Indonesiakan menjadi difabel. Istilah ini berasal dari pengertian *people with different abilities*, yang dimana difabel ini adalah orang yang kemampuan berbeda dan keterbatasan baik dari fungsi gerak tubuhnya fisiknya. (Dewang, 2010). Adapun difabel yang dimaksudkan yakni ibu-ibu, anak-anak, orang tua lanjut usia (lansia), pengguna kursi roda, tunanetra,



tunarungu, tunadaksa dan kelompok lainnya yang memiliki kemampuan berbeda dengan kelompok masyarakat umumnya.

Pakar *Urban design* Shirvani (1985) dan Kornblum (1979) menekankan perancangan ruang kota selayaknya melayani kepentingan publik yang beragam perilakunya. Apalagi kita sadar fungsi ruang publik kota yang menjadi tempat bagi masyarakat untuk menghilangkan kebosanan akan rutinitas kehidupan di kota. Tentu bukan saja dialami sekelompok warga kota, tetapi berlaku menyeluruh. Untuk mendukung konsep desain yang *universal* dimana sesuatu hal yang membatasi seseorang untuk melakukan aktifitas gerak maupun menghambat keleluasan ruang gerak dapat dibebaskan dengan suatu penyediaan aksesibilitas yang memenuhi konsep *Universal Design*. Prinsip dari Universal Design sangat mungkin diterapkan untuk membuat fasilitas bagi difabel dikarenakan segmentasi dari desain ini tidak dibatasi oleh usia, jenis, kelamin, normal atau cacat dan sebagainya.

Merujuk pada Peraturan daerah Kota Makassar No. 6 tahun 2013 tentang pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, maka penyediaan aksesibilitas pada fasilitas bagi difabel ialah salah satu hal yang urgen dan seharusnya perlu segera diimplementasikan. Dalam mewujudkan kesamaan hak tersebut maka sangatlah penting dilakukan evaluasi terhadap aksesibilitas pada fasilitas yang ada saat ini dengan menjadikan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan sebagai parameter dalam menilai kesesuaiannya. Demikian hal ini diharapkan mampu menjadi acuan dalam konsep perancangan ruang publik yang bersifat *universal* atau mampu mengakomodasi seluruh penggunaanya.

B. Rumusan Masalah

Melihat latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka ada beberapa hal yang menarik untuk diketahui lebih jauh yaitu:



1. Bagaimana kesesuaian aksesibilitas difabel di Anjungan Pantai Losari yang ada saat ini dengan PMPU No.30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan?
2. Bagaimana arahan penyediaan aksesibilitas difabel di Anjungan Pantai Losari Kota Makassar yang memenuhi prinsip-prinsip *Universal Design*?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi dan Mengevaluasi aksesibilitas difabel di Anjungan Pantai Losari Kota Makassar yang ada saat ini dengan PMPU No.30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.
2. Merumuskan arahan penyediaan aksesibilitas difabel di Anjungan Pantai Losari Kota Makassar yang memenuhi prinsip-prinsip *Universal Design*

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang di harapkan penulis dalam hasil penelitian ini yaitu:

1. Ilmu pengetahuan, khususnya ilmu arsitektur diharapkan dapat menjadi sebuah pedoman dan memberikan pemahaman atau pengetahuan kepada para perancang tentang perancangan ruang publik dan aplikasinya sehingga tercipta *Universal Design* dan menghasilkan karya yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan difabel agar dapat meningkatkan taraf dan kualitas hidupnya.
2. Pemerintah, memberikan masukan dan sebagai bahan informasi bagi pembuat dan pengambil keputusan pemerintah kota dan pihak swasta dalam hal penyediaan aksesibilitas yang tepat dan memadai bagi seluruh kalangan masyarakat.
3. Peneliti, memberikan landasan bagi studi-studi selanjutnya yang berhubungan dengan fasilitas dan aksesibilitas difabel pada ruang publik kota.



E. Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam pembahasan ini merupakan penegasan batasan-batasan penelitian yang terfokus pada bidang ilmu arsitektur dengan menitikberatkan pada aksesibilitas ruang publik. Lingkup penelitian yang akan dilakukan sebagai objek studi:

1. Lingkup Materi

Ruang lingkup materi yang akan dibahas dalam penelitian ini dibatasi pada:

- a. Penyandang difabel pada penelitian ini dibatasi pada pengguna kursi roda dan tunanetra
- b. Teori dan landasan/ peraturan tentang penyediaan aksesibilitas di Indonesia.

2. Lingkup Wilayah Observasi

Pemilihan Pantai Losari sebagai objek penelitian yang disegmentasikan menjadi 3 bagian yaitu Anjungan Toraja-Mandar menjadi Segmen A, Anjungan Pantai Losari menjadi Segmen B, dan Anjungan Bugis-Makassar menjadi Segmen C, dimaksudkan untuk meneliti hal-hal yang telah diuraikan diatas. Lokasi penelitian ini berada pada Kelurahan Losari, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian meliputi aksesibilitas di Anjungan Pantai Losari Kota Makassar dan Tuna netra serta pengguna kursi roda sebagai pengguna ruang publik.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dalam bentuk penulisan yang terdiri atas lima bab secara berurutan. Sistematika penulisan disusun sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, manfaat, batasan masalah meliputi: lingkup materi, lingkup wilayah, dan objek penelitian, serta sistematika penulisan, dan alur pikir.



BAB II Tinjauan Pustaka

Berisi landasan teori, menguraikan tentang studi kepustakaan yang berkaitan dengan topik dan fokus penelitian yang terdiri atas teori yang mendukung, maupun hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tujuan penelitian, serta kerangka konsep penelitian.

BAB III Metode Penelitian

Berisi metode penelitian, menguraikan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, waktu penelitian, objek penelitian, fokus amatan penentuan sumber data, prosedur pengumpulan data, analisis data, fokus penelitian, dan konsep operasional.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

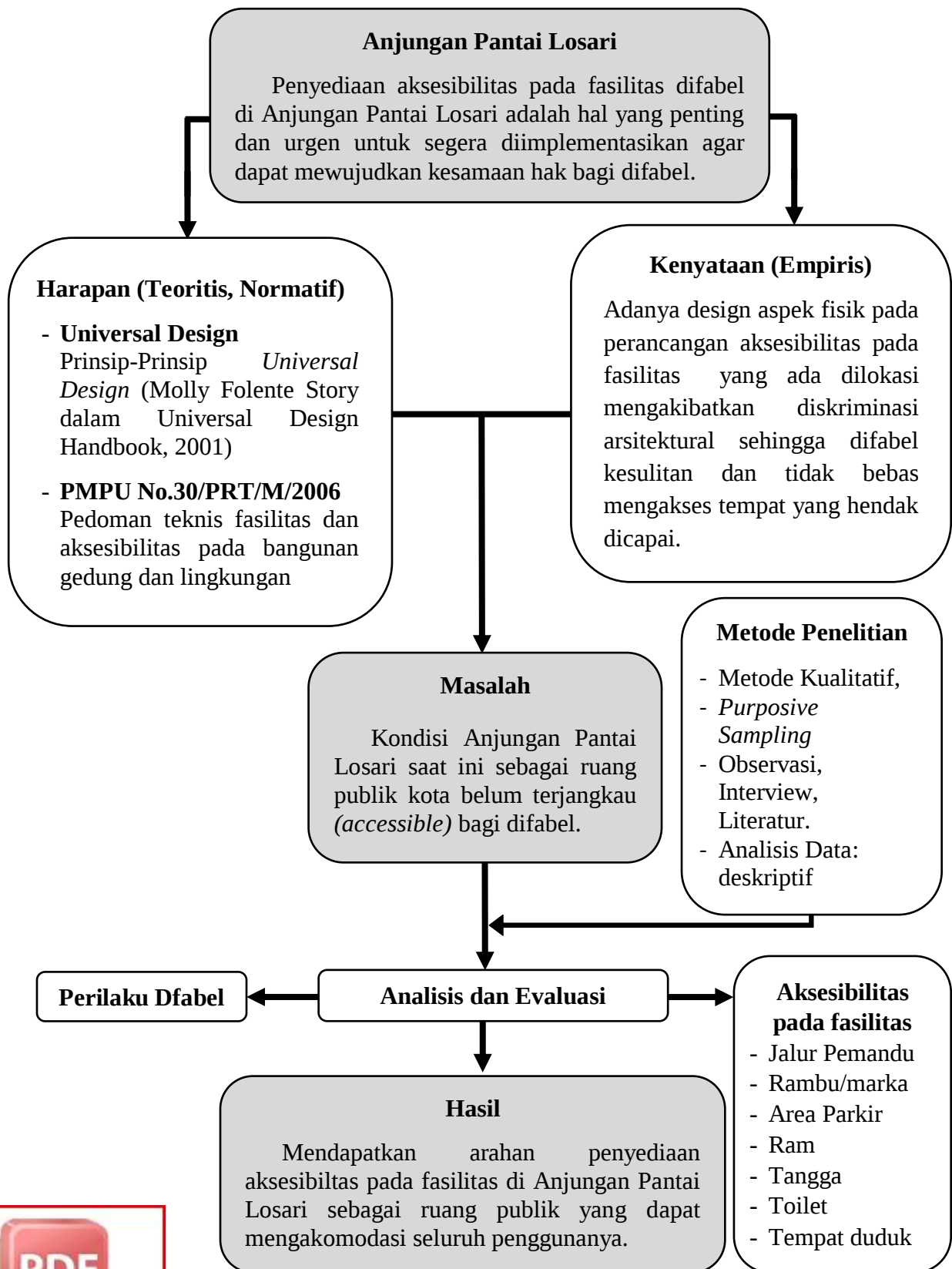
Berisi hasil penelitian dan pembahasan, menguraikan tentang latar belakang keadaan lokasi dan kaitan antara teori dengan keadaan di lapangan.

BAB V Penutup

Berisi penutup, yakni kesimpulan dan saran-saran.



H. Alur Pikir



Bagan 1. Alur Pikir Penelitian
Sumber: Peneliti, 2017

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Difabel

1. Definisi Difabel

Konferensi Ketunetraan Asia di Singapura pada tahun 1981 yang diselenggarakan oleh *International Federation of The Blind (IFB)* dan *World Council for the Welfare of The Blind (WCWB)*, istilah “*diffabled*” diperkenalkan, yang kemudian diindonesiakan menjadi “difabel”. Istilah “*diffabled*” sendiri merupakan akronim dua kata dari “*differently abled*” dan kata bendanya adalah *diffability* yang merupakan akronim dari *different ability* yang dipromosikan oleh orang-orang yang tidak menyukai istilah “*disabled*” dan “*disability*”.

Umumnya masyarakat lebih familiar dengan istilah disabilitas atau penyandang cacat yang lebih menekankan kata “cacat” yang berarti ketidaksempurnaan baik fisik maupun mental yang cenderung bernilai negatif padahal ada ungkapan manusia tidak ada yang sempurna sehingga penulis menilai istilah difabel lebih cocok untuk menggantikan istilah penyandang cacat yang bernilai negatif.

Difabel adalah masyarakat yang memiliki kemampuan berbeda dan keterbatasan baik dari fungsi gerak tubuhnya maupun fisiknya. Kemampuan mereka menjadi berbeda karena mereka memiliki kelebihan dan potensi diri yang tidak kita miliki, serta kemampuan mengoptimalkan setiap potensi diri sekecil apapun (Dewang, 2010). Jadi Difabel adalah suatu kemampuan yang berbeda untuk menyelesaikan suatu persoalan atau melakukan suatu kegiatan dengan cara atau dalam batas-batas yang dipandang normal bagi seorang manusia.

Istilah difabel telah menawarkan wacana lebih bijak karena menempatkan yang memiliki hambatan sementara maupun permanen dalam menjalankan keseharian mereka dalam perspektif luas termasuk di dalamnya



ibu hamil, anak-anak, orang tua lanjut usia (lansia), pengguna kursi roda, tunanetra, tunarungu, tunadaksa dan kelompok lainnya yang memiliki kemampuan berbeda dengan kelompok masyarakat umumnya. Penggunaan istilah difabel memberi peluang untuk memperhatikan dan mengajak kita memahami adanya keberagaman dan menghargai tingkat kemampuan antara satu orang dan lainnya, karena kelompok difabel sebagai kelompok minoritas ini selalu mendapatkan diskriminasi dan tidak memiliki ruang untuk menentukan segala hal yang berkaitan dengan dirinya.

Menurut (Harahap & dkk, 2015) secara umum difabel masih menjadi problem besar di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Mereka adalah bagian dari masyarakat marginal yang tersisihkan dalam proses pembangunan nasional. Mereka tidak mendapat tempat dan posisi yang layak dalam kehidupan social masyarakat.

2. Klasifikasi Difabel

Kritikan terhadap penanganan masalah difabel sesungguhnya sudah direspon World Health Organization (WHO) dan para professional yang bekerja dibidang rehabilitasi. WHO, misalnya sejak tahun 2001 sudah merevisi berbagai definisi difabel. Pedoman dari WHO menjadi acuan di banyak negara termasuk di Indonesia yang disebut *International Classification of Impairment, Disability and Handicap*. Dari pedoman ini ada 3 konsep yang dibedakan, yaitu:

a. *Impairment*

Impairment adalah hilangnya atau ketidaknormalan struktur atau fungsi psikologis, fisik atau anatomi

b. *Disability*

Disability mengacu pada keterbatasan kemampuan untuk melakukan aktivitas secara “normal” yang disebabkan oleh impairment.

c. *Handicap*

Handicap merupakan ketidakberuntungan seseorang yang diakibatkan oleh impairment dan disability yang menyebabkan ia tidak dapat melakukan perannya secara social maupun ekonomi.



WHO merevisi konsep ini menjadi *International Classification of Functioning Disability and Health* (ICF). Pada konsep ini, impairment bukanlah satu-satunya factor yang menjadi focus dalam menilai keberfungsian kemampuan seseorang. Ada dua komponen utama yang perlu dipelajari dalam memahami masalah difabel, yaitu:

a. *Functioning* (Keberfungsian)

Functioning (Keberfungsian) ini meliputi keberfungsian badan/anatomi dan struktur serta aktivitas dan partisipasi.

b. *Disability* (Ketidakmampuan)

Bagian pertama meliputi keberfungsian badan/anatomi dan struktur serta aktivitas dan partisipasi, sedangkan bagian kedua terdiri dari faktor-faktor kontekstual, seperti faktor lingkungan dan faktor-faktor yang sifatnya personal.

Menurut konsep ini, masalah difabel timbul sebagai interaksi dari berbagai komponen-komponen tersebut. Keberfungsian secara fisik dan mental seseorang merupakan prasyarat baginya untuk dapat berpartisipasi dalam berbagai aktivitas. Namun cara ini juga direfleksikan dalam kehidupan social yang menyebabkan terhambatnya difabel mendapatkan kesempatan berpartisipasi secara sama dalam berbagai aktivitas dalam kehidupan masyarakat. (Eva Kasim, 2004).

Dalam guidelines dari proyek ESCAP (1995) disebutkan bahwa untuk kebutuhan perancangan lingkungan terbangun, difabilitas dibagi menjadi beberapa kelompok lagi yaitu:

a. *Orthopaedik (Locomotor Disabilities)*

Orang dalam kelompok ini umumnya adalah mereka yang memiliki disabilitas locomotor (kecacatan dalam alat pergerakannya) yang mempengaruhi mobilitas atau pergerakan. Kelompok ini dibagi lagi menjadi 2 yaitu:



- 1) Ambulant adalah mereka yang mampu, dengan atau tanpa bantuan untuk berjalan atau dapat berjalan baik itu dengan menggunakan alat bantu seperti tongkat dan sebagainya ataupun tidak.
- 2) Orang yang menggunakan kursi roda adalah mereka yang tidak mampu berjalan baik dengan bantuan atau tidak, dan sangat tergantung pada penggunaan kursi roda untuk pergerakannya. Ada yang dapat menjalankan kursi rodanya sendiri, tapi ada pula yang memerlukan bantuan dalam mendorongnya.

a. *Sensory*

Sensory adalah kelompok orang yang mengalami hambatan atau ketidaknyamanan dalam menggunakan lingkungan terbangun sebagai akibat dari adanya kelainan dalam penglihatan ataupun pendengarannya. Kelompok ini terbagi menjadi 2, yaitu:

- 1) Tuna netra, adalah mereka yang sangat tergantung pada indera pendengaran, penciuman dan perasaannya.
- 2) Tuna rungu, adalah mereka yang sangat tergantung pada indera penglihatan dan perasaannya.

b. *Cognitive*

Umumnya, orang-orang di kelompok ini adalah mereka yang memiliki penyakit mental, keterlambatan dalam berkembang atau belajar.

c. *Multiple*

Kelompok ini terdiri dari orang-orang dengan beberapa kecacatan, kombinasi dari kelompok-kelompok sebelumnya.

3. Karakteristik Difabel

Rancangan dari ruang terbuka publik selama ini kebanyakan dilakukan dengan menggunakan orang yang dapat bergerak normal dan dengan ukuran rata-rata sebagai asumsi dalam mendesain. Hal ini menyebabkan diskriminasi arsitektur karena banyak pengguna potensial tidak dapat ikut menggunakan

menikmati ruang terbuka publik karena mendapatkan hambatan (users).



Difabel muncul menggantikan istilah penyandang cacat yang diskriminatif dan melihat manusia sebagai sosok yang dapat dikelompokkan ke dalam kelompok normal dan tidak normal hanya berdasarkan kelengkapan kondisi fisiknya. Fakta menunjukkan bahwa yang sebenarnya ada adalah perbedaan cara dalam menyelesaikan sebuah masalah. (Kurniawan, 2014). Beberapa kelompok yang termasuk dalam deskripsi ini, meliputi:

- a. Pengguna kursi roda
- b. Ambulant disabled
- c. Orang yang memiliki kelainan pada penglihatan
- d. Orang yang memiliki gangguan pendengaran
- e. Orang dengan keterbatasan kemampuan kognitif
- f. Orangtua lanjut usia dengan keterbatasan kekuatan fisik dan gerak
- g. Ibu hamil/ ibu membawa anak kecil
- h. Anak-anak kecil

Dari beberapa kelompok tersebut, pemahaman karakter difabel pada Anjungan Pantai Losari ini difokuskan juga pada beberapa kelompok sebagai *benchmark* dengan pertimbangan kebutuhan khusus yang mereka butuhkan, seperti pengguna kursi roda dan tuna netra. Karakter-karakter tersebut, menurut Kurniawan, dkk (2014), adalah:

a. Pengguna Kursi Roda

Pengguna kursi roda adalah orang dengan ketidakmampuan yang bergantung pada kursi roda dalam mobilitasnya. Kriteria yang mendasari pengguna kursi roda ditempatkan dalam kelompok difabel adalah:

- 1) Berada di level yang lebih rendah daripada orang kebanyakan.
- 2) Berukuran lebih lebar dari kebanyakan orang (karena ditambah lebar kursi roda);
- 3) Hanya bisa menjangkau tempat yang bisa dilalui kursi rodanya.

Beberapa persyaratan dasar yang harus dipenuhi untuk mengakomodasi kebutuhan aksesibilitas pengguna kursi roda adalah sebagai berikut:



- 1) Penempatan semua jenis perabot, panel kontrol dan peralatan harus berada dalam jangkauan;
 - 2) Harus memenuhi persyaratan luasan ruang minimal;
 - 3) Perbedaan ketinggian lantai harus disikapi dengan menambahkan ramp atau lift;
 - 4) Permukaan lantai harus terbuat dari material yang halus dan keras.
- b. Tuna Netra atau Gangguan Penglihatan.

Kriteria yang mendasari orang dengan gangguan penglihatan ditempatkan sebagai difabel adalah sebagai berikut:

- 1) Sulit melihat detail yang ada di lingkungan mereka. Benda-benda terlihat berkabut/kabur. Hanya bisa mengamati benda-benda berukuran besar atau hanya bisa membedakan cahaya dan bayangan.
- 2) Silau dari lantai yang dipoles sangat halus dan permukaan dinding yang sangat reflektif dapat membutakan, seperti ketika melihat cahaya terang dari pencahayaan langsung atau dari jendela.
- 3) Tidak bisa melihat dengan jelas pada tingkat pencahayaan rendah.

Orang dengan gangguan penglihatan terutama tunanetra cukup mudah dikenali saat bermobilitas. Dengan keterbatasan penglihatan yang dimiliki, tunanetra membutuhkan alat bantu untuk bermobilitas seperti tongkat putih atau pun anjing pemandu. Keduanya berperan untuk menggantikan fungsi penglihatan dengan memberikan informasi mengenai kondisi lingkungan di sekitarnya. Beberapa persyaratan dasar yang harus dipenuhi untuk mengakomodasi kebutuhan aksesibilitas orang dengan gangguan visual adalah sebagai berikut:

- 1) Area-area yang membawa potensi bahaya dihindari atau harus dapat diidentifikasi dengan mudah (dengan kontras warna pada tone warna yang sama untuk gangguan penglihatan atau guiding block untuk tuna netra)
- Area open-plan yang luas sebaiknya dihindari atau harus dipecah ke dalam area-area yang lebih kecil
- Koridor berada di sebelah kanan koridor yang lain;
- Ruang-ruang dibuat terang, bebas silau dan tanpa bayangan;



- 5) Ruang-ruang berbentuk persegi empat, karena tuna netra lebih mudah mengorientasikan dirinya sendiri dengan depan, belakang, kiri atau kanan dipandingkan secara diagonal atau dalam kurva;
- 6) Pintu harus selalu terbuka dari area sibuk dan rute sirkulasi ke arah ruang yang tidak sibuk;
- 7) Penyediaan petunjuk orientasi dengan elemen timbul (seperti peta timbul yang diletakkan di pintu masuk bangunan dan guiding block atau varias permukaan lantai.
- 8) Handrail yang juga dilengkapi dengan informasi Braille;
- 9) Penggunaan kaca anti pecah pada elemen dinding yang menggunakan kaca dan juga pintu kaca;
- 10) Penanda visual yang ada dilengkapi dengan penanda audio;
- 11) Penciptaan akustik yang konsisten sepanjang ruang.

4. Pengguna Kursi Roda

Berdasarkan konsep *Universal Design* yang diilustrasikan pada diagram piramida dari pengguna bangunan. Klasifikasi pengguna kursi roda berada pada baris keenam hingga baris kedelapan. Adapun jenis difabel yang menggunakan kursi roda salah satunya adalah tuna daksa.

Tuna daksa adalah suatu keadaan yang terganggu atau rusak sebagai akibat dari gangguan bentuk atau hambatan pada otot, sendi dan tulang dalam fungsinya yang normal. Kondisi ketergangguan ini bisa disebabkan oleh kecelakaan, penyakit atau juga bias disebabkan karena pembawaan sejak lahir, (Somantri, 2006).

5. Tuna Netra

a. Definisi Tuna Netra

Tunanetra adalah istilah umum yang digunakan untuk kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indra penglihatannya. Berdasarkan tingkat gangguannya Tunanetra dibagi dua yaitu buta total (*total blind*) dan yang masih mempunyai sisa penglihatan (*Low Visioan*). Alat bantu untuk mobilitasnya bagi tuna netra dengan menggunakan



tongkat khusus, yaitu berwarna putih dengan ada garis merah horizontal. Akibat hilang/berkurangnya fungsi indra penglihatannya maka tunanetra berusaha memaksimalkan fungsi indra-indra yang lainnya seperti, perabaan, penciuman, pendengaran, dan lain sebagainya sehingga tidak sedikit penyandang tunanetra yang memiliki kemampuan luar biasa misalnya di bidang musik atau ilmu pengetahuan. (Wikipedia, n.d.).

Sedangkan pengertian tunanetra menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak dapat melihat (KBBI, 1989: p.971) dan menurut literatur berbahasa Inggris yaitu *visually handicapped* atau *visually impaired*.

b. Klasifikasi Tuna Netra

Dari berbagai uraian tentang tunanetra di atas maka dapat disimpulkan bahwa tunanetra adalah orang yang mengalami kerusakan penglihatan yang sedemikian rupa sehingga ia tidak dapat menggunakan indera penglihatannya untuk kebutuhan pendidikan ataupun lainnya walaupun dengan bantuan alat bantu, sehingga memerlukan bantuan atau pelayanan pendidikan secara khusus.

Secara garis besar, tunanetra dapat dikelompokkan berdasarkan hal berikut:

1) Klasifikasi Tuna Klasifikasi Tunanetra (*visual impairment*) berdasarkan waktu terjadinya ketunanetraan.

Lowenfeld, (1955: p.219), mengklasifikasikan tunanetra berdasarkan pada waktu terjadinya ketunanetraan, yaitu:

- a) Tunanetra sebelum dan sejak lahir; yaitu mereka yang sama sekali tidak memiliki pengalaman melihat.
- b) Tunanetra setelah lahir atau pada usia kecil; yaitu mereka telah memiliki kesan-kesan serta pengalaman visual tetapi belum kuat dan mudah terlupakan
- c) Tunanetra pada usia sekolah atau pada masa remaja; mereka telah memiliki kesan-kesan visual dan meninggalkan pengaruh yang mendalam terhadap proses perkembangan pribadi.



- d) Tunanetra pada usia dewasa; pada umumnya mereka yang dengan segala kesadaran mampu melakukan latihan-latihan penyesuaian diri.
 - e) Tunanetra pada usia lanjut; sebagian besar sudah sulit mengikuti latihan-latihan penyesuaian diri.
 - f) Tunanetra akibat bawaan (partial sight bawaan).
- 2) Klasifikasi Tunanetra (*visual impairment*) berdasarkan kemampuan daya penglihatan.

Penglihatan yang normal memiliki ketajaman penglihatan 6/6-6/7,5 yaitu jika seseorang dapat melihat benda dengan jelas pada jarak antara 6 sampai dengan 7,5 meter atau efisiensi penglihatan sebesar 95 %-100 %. Maka klasifikasi Tunanetra (*visual impairment*) berdasarkan kemampuan daya penglihatan adalah sebagai berikut.

- a) *Low Vision*; yakni mereka yang memiliki hambatan dalam penglihatan akan tetapi mereka masih mampu melakukan pekerjaan/kegiatan yang menggunakan fungsi penglihatan. *Low Vision* dikelompokkan menjadi:

- (1) *Low Vision* sedang, memiliki ciri-ciri seperti penglihatan 6/60-6/120 yaitu jika orang normal dapat melihat benda dengan jelas sejauh 60 sampai dengan 120 meter, maka perbandingannya dengan orang dengan penglihatan *low vision* adalah sejauh 6 meter atau efisiensi penglihatan sebesar 10%-20%, mendapat kesukaran berlalu lintas dan melihat nomor mobil, membaca perlu memakai lensa kuat dan membaca menjadi lambat.
- (2) *Low Vision* nyata, memiliki ciri-ciri seperti penglihatan 6/240 yaitu jika orang normal dapat melihat benda dengan jelas sejauh 240 meter, maka perbandingannya dengan orang dengan penglihatan *low vision* nyata adalah sejauh 6 meter atau efisiensi penglihatan sebesar 5%, memiliki gangguan masalah orientasi dan mobilitas sehingga perlu tongkat putih untuk berjalan. Umumnya memerlukan sarana baca dengan huruf Braille, radio dan pustaka kaset



- b) Tunanetra setengah berat/hampir buta (*partially sighted*), yakni mereka yang kehilangan sebagian daya penglihatan, hanya dengan menggunakan kaca pembesar mampu mengikuti pendidikan biasa atau mampu membaca tulisan yang bercetak tebal, memiliki ciri-ciri:
 - (1) Penglihatan menghitung jari kurang empat kaki.
 - (2) Penglihatan tidak bermanfaat bagi orientasi mobilitas.
 - (3) Harus memakai alat *non visual*.
 - c) Tunanetra berat/buta total (*totally blind*), yakni mereka yang sama sekali tidak melihat memiliki ciri-ciri:
 - (1) Tidak mengenal adanya rangsangan sinar.
 - (2) Seluruhnya tergantung pada alat indera selain mata.
- 3) Klasifikasi tunanetra berdasarkan pada kelainan-kelainan yang terjadi pada mata.

Menurut Howard dan Orlansky, klasifikasi tunanetra berdasarkan pada kelainan-kelainan yang terjadi pada mata. Kelainan ini disebabkan karena adanya kesalahan pembiasan pada mata. Hal ini terjadi bila cahaya tidak terfokus sehingga tidak jatuh pada retina. Peristiwa ini dapat diperbaiki dengan memberikan lensa atau lensa kontak. Kelainan-kelainan itu antara lain:

- a) *Myopia*; adalah penglihatan jarak dekat, bayangan tidak terfokus dan jatuh di belakang retina. Penglihatan akan menjadi jelas kalau objek didekatkan.
- b) *Hyperopia*; adalah penglihatan jarak jauh, bayangan tidak terfokus dan jatuh di depan retina. Penglihatan akan menjadi jelas jika objek dijauhkan
- c) *Astigmatisme*; adalah penglihatan kabur yang disebabkan karena ketidakberesan pada kornea mata sehingga bayangan benda baik pada jarak dekat maupun jauh tidak terfokus jatuh pada retina.



B. Tinjauan Ruang Publik

Istilah publik adalah istilah yang berasal dari Bahasa Inggris yaitu *public* yang berarti masyarakat. Di dalam Bahasa Inggris pengertian kata *public* menjadi masyarakat, Negara, umum dipakai berganti-ganti misalnya:

1. Yang didefinisikan sebagai masyarakat misalnya *public relationship* (hubungan masyarakat), *public serve* (pelayanan masyarakat),
2. Yang didefinisikan sebagai negara yaitu misalnya *public authorities* (otoritas negara), *Public building* (gedung negara), *public finance* (keuangan negara).
3. Yang didefinisikan sebagai ruangan umum yaitu misalnya *public offering* (penawaran umum), *public ownership* (milik umum), *public utility* (perusahaan umum), *public space* (ruang publik). (Syafiie, 1999:18).

Dalam beberapa pengertian dari kata publik tersebut akan difokuskan kepada suatu hal yaitu *public space*. Dalam pengertian bahasa Indonesia adalah ruang umum yang lebih dikenal dengan ruang publik. Ruang publik adalah ruang yang digunakan dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat bukan untuk seseorang maupun untuk kelompok tertentu.

Ruang publik yang dimaksud secara umum pada sebuah kota, menurut *Project for Public Spaces in New York* tahun 1984, adalah bentuk ruang yang digunakan manusia secara bersama-sama berupa jalan, pedestrian, taman-taman, plaza, fasilitas transportasi umum (halte) dan museum. Sedangkan menurut Roger Scurton (1984) setiap ruang publik memiliki makna sebagai berikut: sebuah lokasi yang didesain seminimal apapun, memiliki akses yang besar terhadap lingkungan sekitar, tempat bertemunya manusia/pengguna ruang publik dan perilaku masyarakat pengguna ruang publik satu sama lain mengikuti norma-norma yang berlaku setempat.

Meskipun sebagian ahli mengatakan umumnya ruang publik adalah ruang

Rustam Hakim (1987) mengatakan bahwa, ruang umum pada dasarnya adalah suatu wadah yang dapat menampung aktivitas tertentu dari masyarakatnya, baik secara individu maupun secara kelompok, dimana bentuk



ruang publik ini sangat tergantung pada pola dan susunan massa bangunan. Menurut sifatnya, ruang publik terbagi menjadi 2 jenis, yaitu:

1. Ruang publik tertutup: ruang publik yang terdapat di dalam suatu bangunan.
2. Ruang publik terbuka : yaitu ruang publik yang berada di luar bangunan yang sering juga disebut ruang terbuka (open space).

Secara historis, menurut (Carr, 1992), macam-macam tipologi ruang publik dalam perkembangannya memiliki banyak variasi dan karakter antara lain:

1. Taman-taman public (public parks).
2. Lapangan dan plaza (square and plaza),
3. Pasar (markets)
4. Jalan (streets)
5. Lapangan bermain (playground).
6. Ruang terbuka untuk masyarakat (community open spaces).
7. Jalan hijau dan jalan taman (greenways and parkways).
8. Atrium/pasar tertutup (atrium/indoor market place)
9. Tepi laut (Waterfronts).

Ruang publik yang baik dikarakteristikan dengan keberadaan banyak orang di dalamnya, seringkali dalam proses yang berjalan sendiri. Fenomena ini dikenal sebagai kehidupan publik informal. Menurut Carr (1992), terdapat lima kebutuhan dasar yang dicari orang dalam area ruang publik:

1. *Comfort*

Kenyamanan adalah prasyarat dari ruang adalah prasyarat dari ruang publik yang berhasil. Lamanya waktu yang dihabiskan berada di ruang publik merupakan indikator dari kenyamanan. Kenyamanan dipengaruhi oleh factor lingkungan seperti matahari, dan angin, kenyamanan fisik (tempat duduk yang cukup nyaman), dan aspek sosial psikologikal.

relaxation



Relaksasi berkaitan dengan ketenangan tubuh dan jiwa. Dalam tataran perkotaan, elemen natural seperti pepohonan, water feature, dan pemisahan dari lalu lintas membuat relaksasi lebih mudah.

3. *Passive Engagement*

Keterlibatan pengguna ruang publik dimana pengguna tersebut berinteraksi dengan tataran fisik lingkungan tanpa secara aktif terlibat.

4. *Active Engagement*

Active Engagement terjadi ketika para pengguna berinteraksi satu sama lain dalam ruang publik.

5. *Discovery*

Orang mengharapkan ‘tontonan’ yang baru atau pengalaman yang menyenangkan ketika menggunakan ruang publik, karena orang membutuhkan variasi dari rutinitas.

Kegagalan ruang terbuka publik untuk dapat mengakomodasi masyarakat difabel adalah hambatan yang sangat besar. Kebutuhan yang berbeda dengan masyarakat normal lain, yang belum tersedia pada ruang terbuka publik, sangat membatasi akses mereka untuk masuk dan menggunakan ruang-ruang tersebut. Bagi difabel, hambatan fisik dan juga bahaya yang dapat ditimbulkan dari orang-orang sekitar, membuat ruang terbuka publik tidak menarik untuk didatangi (Dewang, 2010).

Rancangan dari ruang terbuka publik yang selama ini kebanyakan dilakukan dengan menggunakan orang yang dapat bergerak normal dan dengan ukuran rata-rata sebagai asumsi, menyebabkan banyak pengguna potensial tidak dapat ikut memasuki dan menggunakan ruang terbuka publik, karena mereka mendapatkan hambatan (*barriers*). Kelompok-kelompok yang memiliki keterbatasan fisik dan difabel) tersebut, meliputi : Penyandang cacat, yaitu pengguna kursi roda, orang yang memiliki kelainan pada penglihatan, dan juga kelainan pada pendengarannya dan berbicara, Orang tua dengan keterbatasan kekuatan fisik dan anak-anak kecil, Ibu-ibu hamil/ibu membawa anak kecil.



C. Universal Design

1. Pengertian *Universal Design*

Universal Design pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat oleh Ron Mace pada tahun 1985. Sebelumnya pada tahun 1950 dikenal dengan istilah *Terminology Barrier Free Design* (Desain bebas hambatan) yang dalam perkembangannya *Barrier-Free* hanya dapat dipergunakan oleh difabel. Sehingga kedudukan Antara Difabel dan Non Difabel di ruang publik menjadi terpisah, hal ini tidak sesuai dengan *equality* yang mengharuskan adanya persamaan hak bagi setiap orang di ruang publik. Selanjutnya pada tahun 1970 berkembang *Terminology* yang lebih populer yang dikenal dengan *Accesibel Design* (Design yang aksesibel) yang mengatakan bahwa sarana dan prasarana aksesibilitas adalah parameter yang mempengaruhi pergerakan masyarakat di ruang publik. Tetapi *Accesibel Design* dalam penerapannya dirasakan masih kurang praktis karena cakupannya terlalu luas.

Oleh karena itu Ron Mace mengatakan perlu adanya suatu standar minimum untuk mengatur fasilitas umum kaum Difabel dan Non Difabel di ruang publik secara bersamaan yang kini dikenal *Universal Design*. Dalam artian *Universal Design* adalah produk/hasil design dan lingkungan yang dihasilkan dalam perancangan lingkungan binaan yang memungkinkan semua orang dapat dengan mudah untuk mengakses setiap elemen didalamnya. Dalam penerapannya *Universal Design* bisa tidak sama di setiap tempat tergantung dari berbagai pendekatan desain dan undang-undang yang berlaku. (Ostroff, 2011)

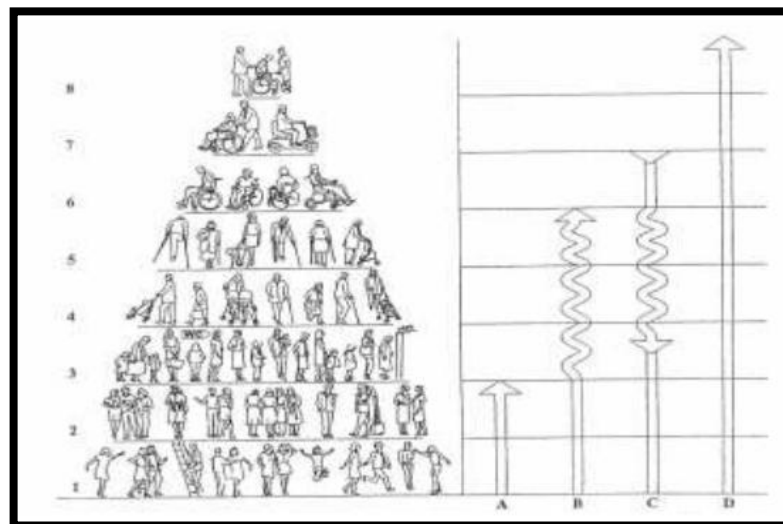
2. Filosofi *Universal Design*

Arsitek yang memilih metode *bottom up* untuk *universal design*.
menjalkan desainnya dengan dasar pemikiran bahwa orang-orang yang
uk memakai bangunan tersebut, termasuk orang-orang yang memiliki
ilitas, adalah orang-orang yang diperlakukan sebagai orang-orang yang
al. Arsitek tidak memulai desain dengan praduga bahwa orang yang



memiliki disabilitas itu abnormal, berbeda, oleh karena itu untuk membuat bangunan tersebut menjadi aksesibel bagi mereka, maka desain harus dapat dikemas bersamaan dengan menggunakan beberapa standar aksesibilitas bagi orang yang difabel, sehingga seharusnya proses desain yang digunakan yaitu *top-down* sebagai *add-ons*, dimana kebutuhan bagi orang-orang normal berbeda dengan orang-orang yang memiliki disabilitas. Metodologi dari proses desain *top down* yaitu produk yang dari awal telah didesain untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang memiliki difabilitas sudah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga desain tersebut juga dapat memenuhi kebutuhan orang-orang normal.

Pada bangunan publik, yang dapat digunakan oleh semua orang, langkah untuk menerapkan konsep *Universal Design* diilustrasikan pada diagram piramida dari pengguna bangunan. Untuk bangunan yang dapat memenuhi kenyamanan bagi kebutuhan semua pengguna. Arsitek mendesain dari satu baris ke baris berikutnya, melihat seberapa besar parameter akomodasi bagi orang-orang normal dan dengan melakukan hal tersebut, dapat meminimalisir penyediaan ruang/fasilitas yang dikhususkan bagi orang-orang dengan difabilitas. Tujuannya agar tidak ada seorang pun yang terkena dampak dari difabilitas desain arsitektur misalnya, kesulitan dalam penggunaan bangunan/salah satu fitur pada bangunan tersebut karena kesalahan desain, atau memang desainnya yang seperti itu.



Gambar 1. Universal Design Pyramid

Sumber: (*Universal Design A Manual of Practical Guidance for Architects, Handbook, 2000*)

a. Penjelasan Baris

- 1) Pada baris pertama, adalah orang-orang masih fit, dan masih tangkas, orang-orang yang masih berlari, melompat, menaiki tangga, menari, membawa barang bawaan yang berat.
- 2) Pada baris kedua, adalah orang-orang dewasa yang normal, tidak memiliki cacat fisik, dapat berjalan kemanapun mereka mau, tidak memiliki masalah dengan pergerakan.
- 3) Pada baris ketiga, sama dengan baris pertama dan kedua, pada baris ketiga ini adalah orang-orang yang normal, terdiri dari wanita/perempuan. Karena pada bangunan publik biasanya mereka mendapatkan diskriminasi, misalnya pada penggunaan toilet umum dimana biasanya setengah dari jumlah urinal untuk pria, sehingga efeknya terpaksa menunggu antrian yang panjang dan terkadang memilih untuk tidak menggunakan toilet.
- 4) Pada baris keempat, adalah orang-orang yang sudah tua, manula yang masih berjalan menggunakan tongkat, dan tidak menyebut dirinya sebagai difabel.
- 5) Pada baris kelima adalah, orang-orang penyandang cacat atau yang memiliki disabilitas.
- 6) Pada baris keenam, adalah orang-orang yang menggunakan kursi roda.
- 7) Pada baris ketujuh, adalah para pengguna kursi roda yang membutuhkan bantuan orang lain untuk membantu mereka ketika sedang berada di bangunan publik, atau orang-orang disable yang menggunakan *electric scooters*.
- 8) Pada baris kedelapan, adalah orang-orang pengguna kursi roda yang membutuhkan dua orang sekaligus ketika mereka hendak keluar.

Penjelasan Diagram



- 1) Pada point A, arsitek masih bisa memenuhi aturan/satandar perencanaan bangunan dengan cukup baik untuk pada baris pertama dan kedua. Perlu diingat tidak terdapat bayi pada kedua baris tersebut.
- 2) Pada point B, yang mewakili baris ketiga, keempat dan kelima, menunjukkan bahwa pengguna bangunan yang ketika bangunan tersebut didesain seharusnya sudah dapat terpenuhi kebutuhannya, namun pada kenyataannya tidak, orang-orang tersebut sebenarnya tidak akan mengalami difabilitas arsitektural apabila ketentuan/standar yang digunakan pada bangunan sudah sesuai dengan kebutuhan mereka.
- 3) Pada point C, menunjukkan hasil dari metode *top-down*, dimana orang-orang pada baris ketiga, keempat dan kelima butuh sepenuhnya dipenuhi kebutuhannya ketika mereka menggunakan bangunan publik.
- 4) Pada point D, menunjukkan hasil dari pengaplikasian dari prinsip-prinsip Universal Design, bangunan sepenuhnya nyaman digunakan oleh semua pengguna. (Goldsmith & Selwyn, 2000)

Jadi, dengan memperluas parameter akomodasi dari ketentuan normal, dengan ketentuan tambahan yang khusus pada tempat yang dibutuhkan. Tujuan sebenarnya dari seorang arsitek yaitu untuk membuat bangunan yang nyaman mungkin bagi semua penggunanya, kondisi operasionalnya juga dibuat nyaman mungkin, sehingga dapat menghindari diskriminasi arsitektural (Riestya dkk, 2013).

3. Prinsip-prinsip *Universal Design*

Tujuan dari prinsip *Universal Design* adalah untuk menyampaikan konsep desain universal secara komprehensif. Dari tahun 1994 hingga 1997 lembaga *Center of Universal Design* melakukan penelitian dan demonstrasi proyek ini yang didanai oleh US *Departement of Education's National Institute on Disability and Rehabilitation Research* (NIDRR). Proyek ini diberi nama "lebih lanjut pembangunan Universal Desain". Kegiatan dari proyek ini untuk mengembangkan berbagai pedoman-pedoman mengenai desain universal. Salah satu hasil dari proyek ini adalah dihasilkannya prinsip-



prinsip dasar *Universal Design*, menurut Molly Folente Story dalam *Universal Design Handbook* (Preiser & Smith, 2001). Prinsip-prinsip utama *Universal Design*, yaitu:

a. Dapat digunakan oleh setiap orang (*Equitable Use*)

Definisi : Desainnya berguna dan dapat dipasarkan kepada orang-orang dengan beragam kemampuan.

Pedoman:

- 1) Menyediakan sarana yang sama digunakan untuk semua pengguna, identik bila memungkinkan, atau paling tidak setara.
- 2) Desain tidak boleh mengedepankan maksud untuk mengisolasi atau menstigmatisasi sekelompok pengguna manapun atau memberikan hak istimewa kepada sebuah kelompok.
- 3) Ketentuan untuk privasi, keamanan, dan keselamatan harus tersedia bagi semua pengguna.
- 4) Membuat desain menarik bagi semua

b. Fleksibilitas dalam Penggunaan (*Flexibility in Use*)

Definisi : Desain mengakomodasi semua jenis pengguna dan berbagai kemampuan individu.

Pedoman:

- 1) Desain harus memperbolehkan setiap orang untuk menggunakannya lebih dari satu ketentuan.
- 2) Desain harus mengakomodasi baik pengguna tangan kanan maupun kidal.
- 3) Desain juga harus mempunyai fleksibilitas untuk digunakan meskipun pengguna memakai cara yang tidak konvensional atau tidak terduga.

c. Desain yang sederhana dan Mudah Digunakan (*Simple and Intuitive Use*)

Definisi : Penggunaan desain mudah dimengerti, ditinjau dari segi pengalaman dan kemampuan pengguna.



Pedoman:

- 1) Desain dibuat mudah dimengerti
- 2) Desain disesuaikan dengan kemampuan dasar pengguna dan intuisi dasar semua kemampuan pengguna.
- 3) Mengakomodasi berbagai jenis huruf khusus dan kemampuan berbahasa.
- 4) Perletakkan informasi penting ditempat-tempat strategis
- 5) Mengadakan evaluasi setelah dilakukannya proses desain.

d. Informasi yang memadai (*Perceptible Information*)

Definisi : Produk desain dilengkapi informasi pendukung yang penting untuk pengguna dimana informasi yang diberikan disesuaikan dengan kemampuan pengguna.

Pedoman:

- 1) Penggunaan jenis marka yang berbeda (gambar, tulisan, tekstur) untuk menunjukkan informasi penting secara jelas.
- 2) Memberikan perbedaan yang cukup kontras antara informasi penting dengan sekitarnya.
- 3) Memastikan agar informasi penting mudah dimengerti, mudah terbaca dan memberikan petunjuk atau arah dengan jelas mudah sesuai dengan kemampuan pengguna yang berbeda-beda.
- 4) Membedakan elemen dalam cara-cara yang dapat digambarkan (yaitu, membuatnya mudah).
- 5) Menyediakan berbagai teknik atau alat dan bentuk informasi penting agar mudah digunakan dan dimengerti oleh pengguna dengan keterbatasan sensorik.

e. Toleransi Kesalahan (*Tolerance for Error*)

Definisi : Meminimalisasi bahaya dan konsekuensi yang merugikan dari tindakan disengaja atau tidak disengaja.

Pedoman:

- 1) Pengaturan elemen untuk meminimalkan bahaya dan kesalahan mulai dari elemen yang paling sering digunakan,



yang paling mudah diakses, unsur berbahaya dihilangkan, terisolasi, atau terlindung.

- 2) Menyediakan tanda peringatan bahaya yang aman.
- 3) Menyediakan tanda yang aman apabila ada fitur yang gagal.
- 4) Mencegah hilangnya kewaspadaan dalam setiap tindakan secara sadar.

f. Upaya Fisik Rendah (Low Physical Effort)

Definisi : Desain dapat digunakan secara efisien dan nyaman dan dengan minimalisasi resiko kecelakaan.

Pedoman:

- 1) Desain dapat digunakan dalam posisi tubuh normal.
- 2) Desain digunakan dengan cara yang biasa.
- 3) Desain dapat digunakan dengan mudah dan dalam sekali gerakan tanpa perlu berulang-ulang

g. Ukuran dan Ruang untuk Pendekatan dan Penggunaan (*Size and Space for Approach and Use*)

Definisi : Produk desain dilengkapi informasi pendukung yang penting untuk pengguna dimana informasi yang diberikan disesuaikan dengan kemampuan pengguna.

Pedoman:

- 1) Memberikan bentuk dan batas yang tegas serta jelas di setiap desain.
- 2) Membuat semua komponen yang nyaman untuk setiap pengguna duduk atau berdiri.
- 3) Mengakomodasi variasi ukuran tangan dan ukuran grip.
- 4) Memperhatikan kebutuhan minimum standar ruang.

4. *Universal Design* Bentuk Perwujudan Konsep Persamaan Hak

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 tertera persamaan hak bagi setiap negara tanpa membedakan kondisi fisik, serta memberikan dukungan dan persamaan hak kepada difabel dengan menerbitkan sebagai peraturan pengadaan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan difabel. Titik tolak dari perwujudan bangunan dan lingkungan yang



berwawasan adil bagi semua kelompok masyarakat (*development for all*) berarti memiliki asas kebersamaan semua warga negara, tidak dibedakan kemampuan dan kepentingan individual dalam pembangunan ekaligus dapat menikmati hasil pembangunan (Wiwik, 2005).

HAM ini berlaku secara universal dimana dasar-dasarnya tertuang deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat (*Declaration of Independence Of USA*) dan tercantum dalam UUD 1945 Republik Indonesia, seperti pada Pasal 27 Ayat 1, Pasal 28, Pasal 29 Ayat 2, Pasal 30 Ayat 2, dan Pasal 31 Ayat 1. Pandangan terhadap kesamaan kesempatan pada aspek kehidupan dan penghidupan yang tidak memandang bangsa, suku, agama, jenis kelamin, kondisi fisik, udaya dan pengetahuan.

Senada dengan pengertian “*equality*” (persamaan atau keadilan) yang menekankan *equality in acces* atau *acces for all* (Kevin Lynch, 1987). Kehidupan difabel membutuhkan kesetaraan dalam ruang public yang dalam pembangunannya harus mementingkan aspek aksesibilitas dan fasilitas difabel sehingga difabel dapat hidup mandiri. Hal ini merupakan bentuk hak asasi yang melekat pada diri manusia, dan tanpa hak tersebut manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia (Atmacendana dkk, 2016)

D. Tinjauan Aksesibilitas

1. Definisi Fasilitas dan Aksesibilitas

Pengertian fasilitas dan aksesibilitas menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 yaitu:

- a. Fasilitas adalah semua atau sebagian dari kelengkapan prasarana dan sarana pada bangunan gedung dan lingkungannya agar dapat diakses dan dimanfaatkan oleh semua orang termasuk penyandang cacat dan lansia.
- b. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi semua orang guna merujudkan kesamaan kesempatan



2. Asas Fasilitas dan Aksesibilitas

Asas aksesibilitas di Indonesia menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 30/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan adalah :

- a. Keselamatan, yaitu setiap bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan terbangun, harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang.
- b. Kemudahan, yaitu setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
- c. Kegunaan, yaitu setiap orang harus dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
- d. Kemandirian, yaitu setiap orang harus bisa mencapai, masuk dan mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain.

3. Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas

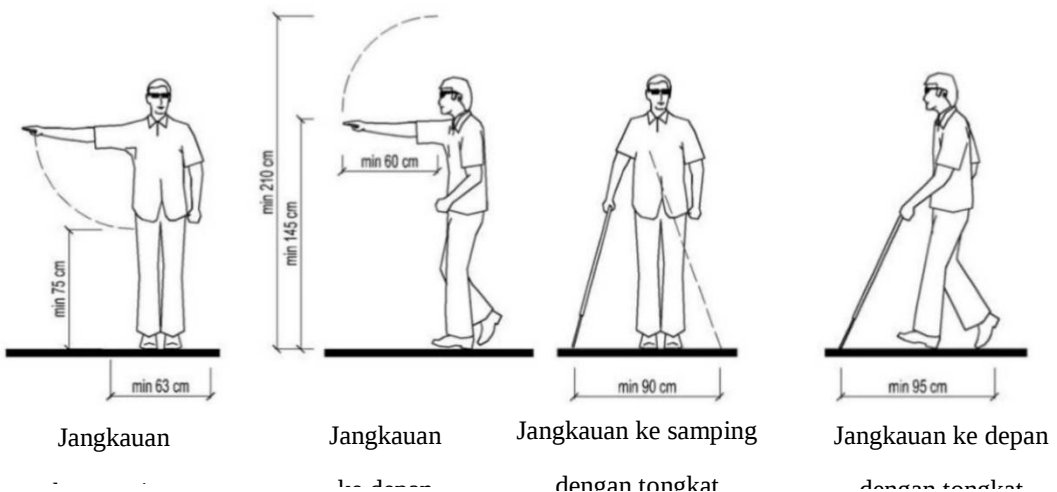
Pedoman teknis ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi kegiatan pembangunan, yang meliputi perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi serta pemanfaatan bangunan gedung dan lingkungan yang aksesibel bagi semua orang dengan mengutamakan semua orang termasuk penyandang cacat dan lansia.

Tujuan dari penyusunan pedoman teknis ini adalah untuk mewujudkan kesamaan, kesetaraan, kedudukan dan hak kewajiban serta peningkatan peran penyandang cacat dan lansia diperlukan sarana dan upaya yang memadai, terpadu/inklusif dan berkesinambungan yang pada akhirnya dapat mencapai kemandirian dan kesejahteraan penyandang cacat dan lansia.

Pada halaman berikut akan dideskripsikan bagaimana persyaratan teknis fasilitas dan aksesibilitas yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 30/Prt/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.

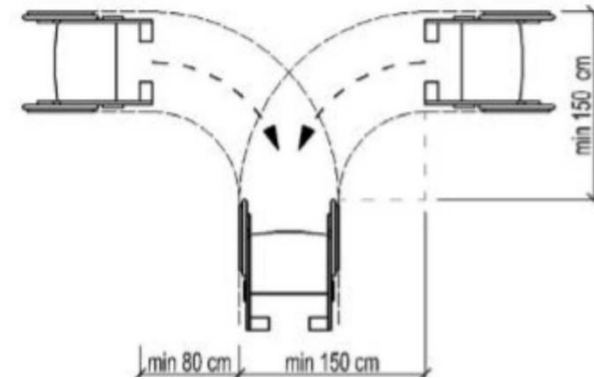


Tabel 1. Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan dan Lingkungan (PERMEN PU No.30/PRT/M/2006)

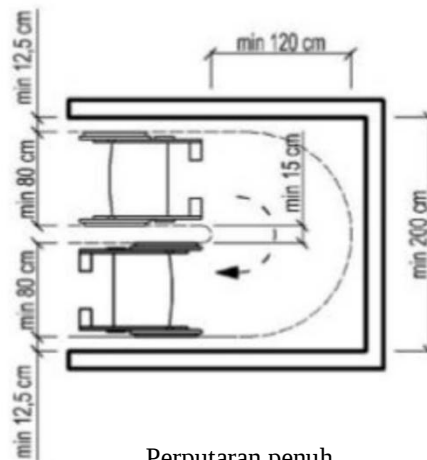
No. 1	Elemen Amatan 2	Esensi 3	Persyaratan 4
		Ukuran dasar ruang tiga dimensi (panjang, lebar, tinggi) mengacu kepada ukuran tubuh manusia dewasa, peralatan yang digunakan, dan ruang yang dibutuhkan untuk mewadahi pergerakan penggunanya.	Ukuran dasar minimum dan maksimum yang digunakan dalam pedoman ini dapat ditambah atau dikurangi sepanjang asas-asas aksesibilitas dapat tercapai.
		Ukuran dan Detail Penerapan Standar	
		a. Ruang gerak untuk tuna netra  Jangkauan Jangkauan ke depan Jangkauan ke samping dengan tongkat Jangkauan ke depan dengan tongkat	
		Gambar 2. Ruang gerak untuk tuna netra	



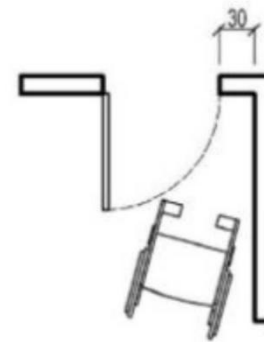
b. Ruang gerak untuk kursi roda



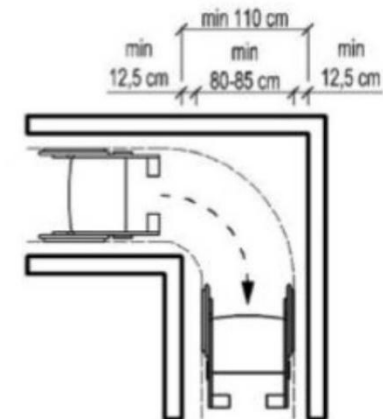
Ruang gerak kursi roda standar



Perputaran penuh



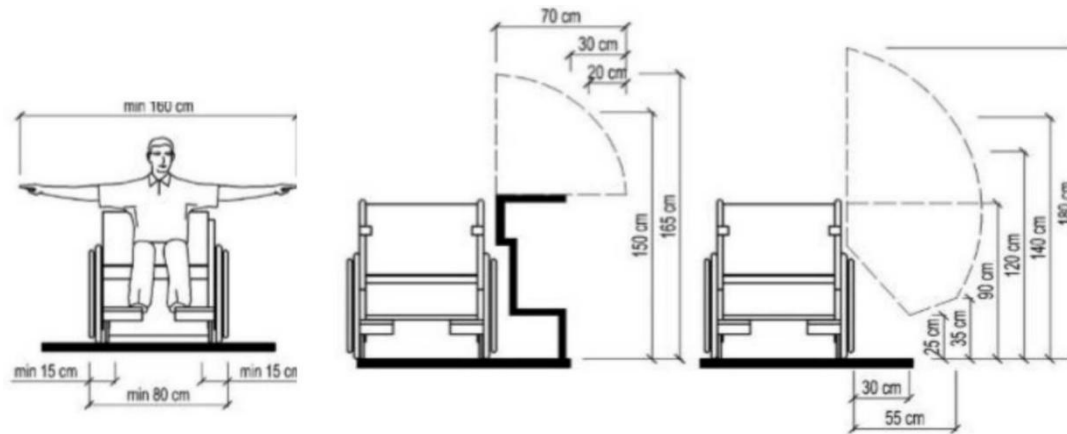
Membuka pintu tanpa manuver



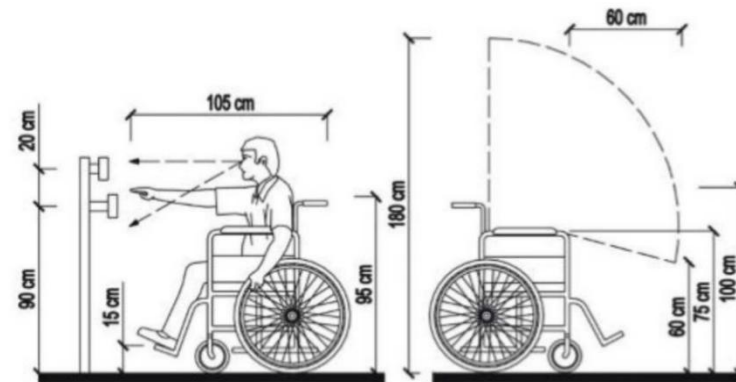
Belokan tegak lurus

Gambar 3. Ruang gerak untuk kursi roda





Jangkauan maks. ke samping untuk pengoperasian alat



Jangkauan maks. ke depan untuk pengoperasian alat

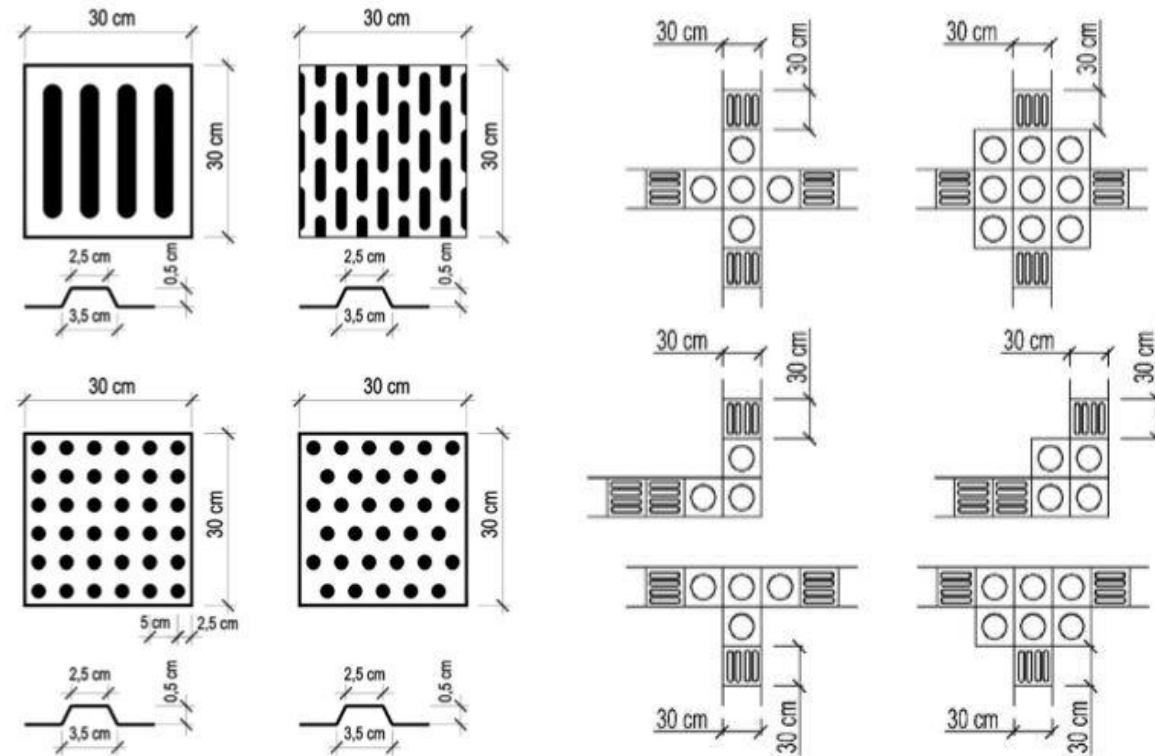
Gambar 4. Jangkauan pengoperasian alat



No. 1	Elemen Amatan 2	Esensi 3	Persyaratan 4
2	Jalur Pemandu	Jalur yang memandu penyandang cacat untuk berjalan dengan memanfaatkan tekstur ubin pengarah dan ubin peringatan.	1. Tekstur ubin pengarah bermotif garis-garis menunjukkan arah perjalanan. 2. Tekstur ubin peringatan (bulat) memberi peringatan terhadap adanya perubahan situasi di sekitarnya. 3. Jalur pemandu disediakan menuju kelengkapan elemen elemen lanskap/perabot/street furniture antara lain: a. peta situasi/rambu; b. kamar kecil/toilet umum; c. tangga; d. ram; e. tempat parkir; f. tempat pemberhentian/halte bus 4. Jalur pemandu harus berdekatan dengan: a. Kursi taman b. Tempat sampah c. Telepon umum 5. Perletakan perabot jalan (street furniture) haruslah mudah dicapai oleh setiap orang



Ukuran dan Detail Penerapan Standar



Tipe tekstur ubin pemandu (guiding blocks)

Susunan ubin pemandu pada belokan

Gambar 5. Ubin Pemandu



No. 1	Elemen Amatan 2	Esensi 3	Persyaratan 4
3	Rambu dan Marka	Fasilitas dan elemen bangunan yang digunakan untuk memberikan informasi, arah, penanda atau petunjuk, termasuk di dalamnya perangkat multimedia informasi dan komunikasi bagi penyandang cacat.	1. Penggunaan rambu terutama dibutuhkan pada: a. Arah dan tujuan jalur pedestrian b. KM/WC umum, telepon umum c. Parkir khusus penyandang cacat d. Nama fasilitas dan tempat e. Telepon dan ATM 2. Persyaratan Rambu yang digunakan: a. Rambu huruf timbul atau huruf Braille yang dapat dibaca oleh tuna netra dan penyandang cacat lain b. Rambu yang berupa gambar dan simbol sebaiknya dengan sistem cetak timbul, sehingga yang mudah dan cepat ditafsirkan artinya c. Rambu yang berupa tanda dan simbol internasional; d. Rambu yang menerapkan metode khusus (misal: pembedaan perkerasan tanah, warna kontras, dll); e. Karakter dan latar belakang rambu harus dibuat dari bahan yang tidak silau. Karakter dan simbol harus kontras dengan latar belakangnya, apakah karakter terang di atas gelap, atau sebaliknya; f. Proporsi huruf atau karakter pada rambu harus mempunyai rasio lebar dan tinggi antara 3: 5 dan 1:1, ketebalan huruf antara 1: 5 dan 1:10;



			g. Tinggi karakter huruf dan angka pada rambu harus diukur sesuai dengan jarak pandang dari tempat rambu itu dibaca. 3. Jenis-jenis Rambu dan Marka yang dapat digunakan antara lain: - Alarm Lampu Darurat Tuna - Audio Untuk Tuna Rungu - Fasilitas Teletext Tunarungui. - Light Sign (papan informasi). - Fasilitas TV Text Bagi Tunarungu - Fasilitas Bahasa Isyarat (sign language) 4. Lokasi penempatan rambu: - Penempatan yang sesuai dan tepat serta bebas pandang tanpa penghalang. - Satu kesatuan sistem dengan lingkungannya. - Cukup mendapat pencahayaan, termasuk penambahan lampu pada kondisi gelap. - Tidak mengganggu arus (pejalan kaki) dan sirkulasi (buka/tutup pintu, dll).
			Ukuran dan Detail Penerapan Standar





Simbol Aksesibilitas



Simbol Tuna Rungu



Simbol Tuna Daksa



Simbol Telepon untuk difabel



Simbol Ram difabel



Simbol Ram dua arah



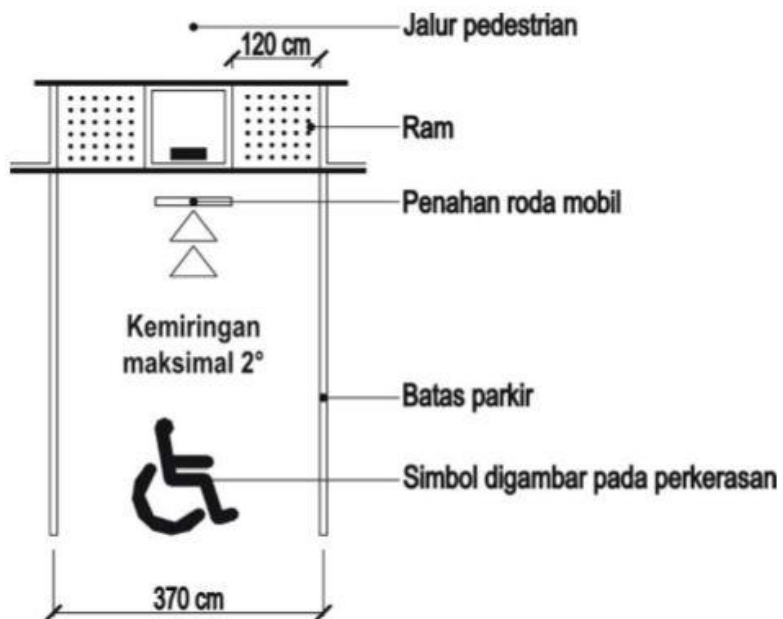
Simbol telepon untuk tuna rungu

Gambar 6. Simbol rambu dan marka



1	2	3	4
4	Area Parkir	Area parkir adalah tempat parkir kendaraan yang dikendarai oleh penyandang cacat, sehingga diperlukan tempat yang lebih luas untuk naik turun kursi roda, daripada tempat parkir yang biasa.	1. Tempat parkir penyandang cacat terletak pada rute terdekat menuju bangunan/ fasilitas yang dituju, dengan jarak maksimum 60 meter 2. Jika tempat parkir tidak berhubungan langsung dengan bangunan, misalnya pada parkir taman dan tempat terbuka lainnya, maka tempat parkir harus diletakkan sedekat mungkin dengan pintu gerbang masuk dan jalur pedestrian; 3. Area parkir harus cukup mempunyai ruang bebas di sekitarnya sehingga pengguna berkursi roda dapat dengan mudah masuk dan keluar dari kendaraannya; 4. Area parkir khusus penyandang cacat ditandai dengan simbol tanda parkir penyandang cacat yang berlaku; 5. Pada lot parkir penyandang cacat disediakan ram trotoir di kedua sisi kendaraan; 6. Ruang parkir mempunyai lebar 370 cm untuk parkir tunggal atau 620 cm untuk parkir ganda dan sudah dihubungkan dengan ram dan jalan menuju fasilitasfasilitas lainnya
Ukuran dan Detail Penerapan Standar			





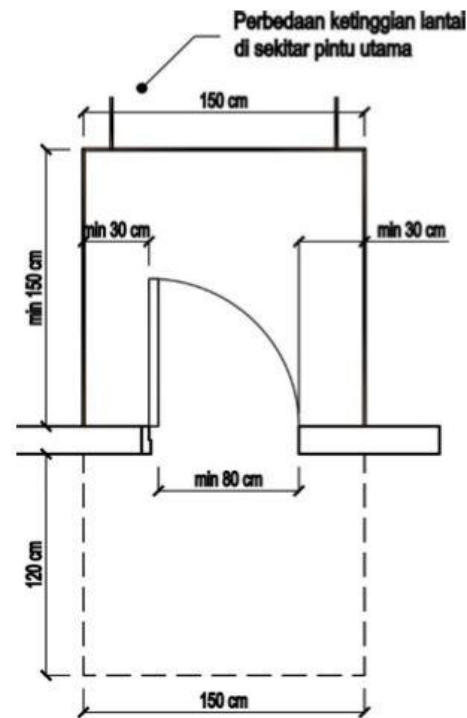
Gambar 7. Tipikal Ruang Parkir



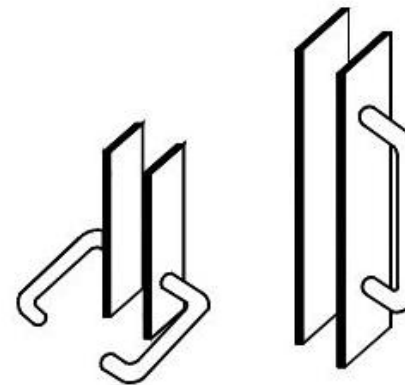
No. 1	Elemen Amatan 2	Esensi 3	Persyaratan 4
5	Pintu	Pintu adalah bagian dari suatu tapak, bangunan atau ruang yang merupakan tempat untuk masuk dan keluar dan pada umumnya dilengkapi dengan penutup (daun pintu).	1. Pintu pagar ke tapak bangunan harus mudah dibuka dan ditutup oleh penyandang cacat. 2. Pintu keluar/masuk utama memiliki lebar manfaat bukaan minimal 90 cm, dan pintupintu yang kurang penting memiliki lebar bukaan minimal 80 cm. 3. Di daerah sekitar pintu masuk sedapat mungkin dihindari adanya ram atau perbedaan ketinggian lantai. 4. Jenis pintu yang penggunaannya tidak dianjurkan: 5. Pintu geser; ii. Pintu yang berat, dan sulit untuk dibuka/ditutup; iii. Pintu dengan dua daun pintu yang berukuran kecil; iv. Pintu yang terbuka ke dua arah ("dorong" dan "tarik"); v. Pintu dengan bentuk pegangan yang sulit dioperasikan terutama bagi tuna netra. 6. Hindari penggunaan bahan lantai yang licin di sekitar pintu. 7. Alat-alat penutup pintu otomatis perlu dipasang agar pintu dapat menutup dengan sempurna, karena pintu yang terbuka sebagian dapat membahayakan penyandang cacat. 8. Plat tendang yang diletakkan di bagian bawah pintu diperlukan bagi pengguna kursi roda dan tongkat tuna netra



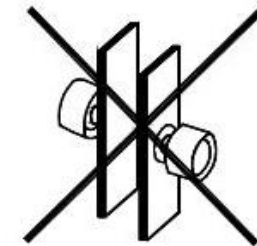
Ukuran dan Detail Penerapan Standar



Gambar 9. Ruang bebas pintu 1 daun



Model pegangan pintu yang direkomendasikan



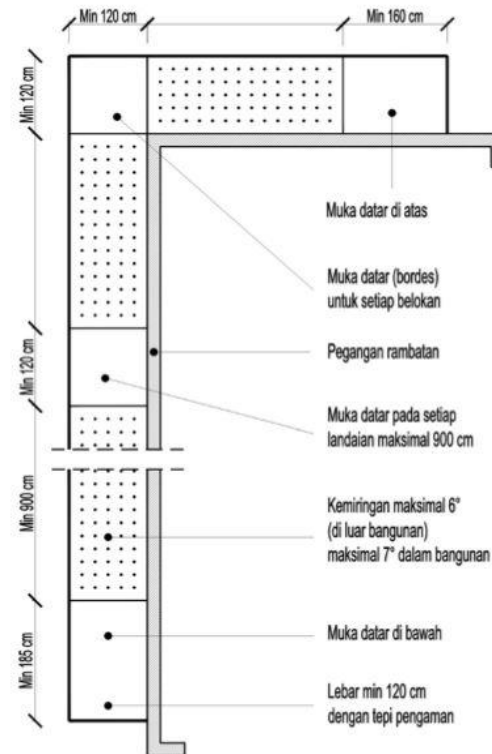
Model pegangan pintu yang tidak direkomendasikan



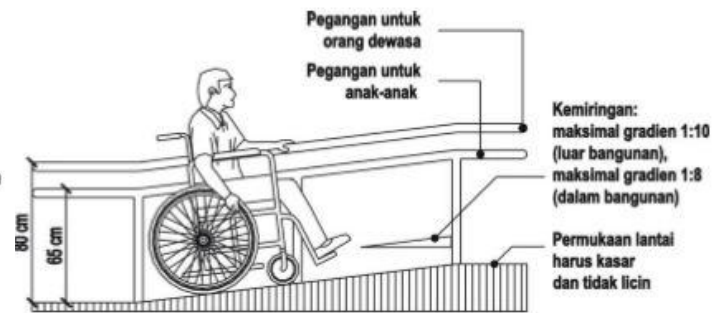
No. 1	Elemen Amatan 2	Esensi 3	Persyaratan 4
6	Ram	Ram adalah jalur sirkulasi yang memiliki bidang dengan kemiringan tertentu, sebagai alternatif bagi orang yang tidak dapat menggunakan tangga.	1. Kemiringan suatu ram yang ada di luar bangunan maksimum 6°, dengan perbandingan antara tinggi dan kelandaian 1:10. 2. Lebar minimum dari ram adalah 95 cm tanpa tepi pengaman, dan 120 cm dengan tepi pengaman. 3. Muka datar/bordes pada awalan atau akhiran dari suatu ram harus bebas dan datar sehingga memungkinkan sekurang-kurangnya untuk memutar kursi roda dengan ukuran minimum 160 cm. 4. Permukaan datar awalan atau akhiran suatu ram harus memiliki tekstur sehingga tidak licin baik diwaktu hujan. 5. Lebar tepi pengaman ram/kanstin/ low curb 10 cm, dirancang untuk menghalangi roda kursi roda agar tidak terperosok atau keluar dari jalur ram. 6. Pencahayaan disediakan pada bagian-bagian ram yang memiliki ketinggian terhadap muka tanah sekitarnya dan bagian-bagian yang membahayakan. 7. Ram harus dilengkapi dengan pegangan rambatan (handrail) yang dijamin kekuatannya dengan ketinggian yang sesuai. Pegangan rambat harus mudah dipegang dengan ketinggian 65 - 80 cm.



Ukuran dan Detail Penerapan Standar

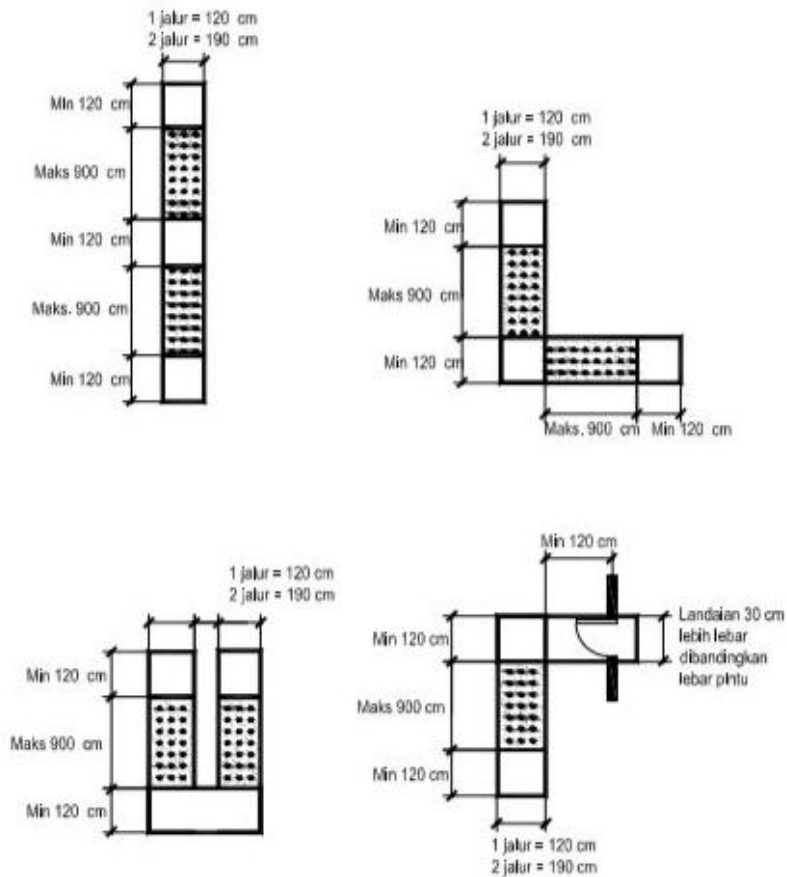


Tipikal ram



Handrail

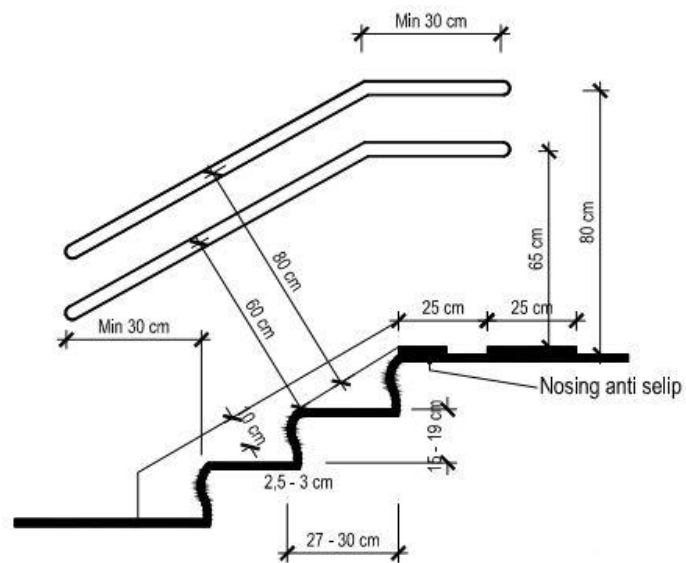




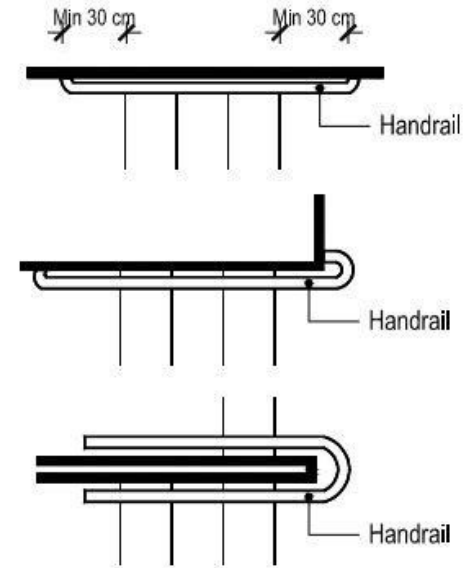
Gambar 10. Ram

7	Tangga	Fasilitas bagi pergerakan vertikal yang dirancang dengan mempertimbangkan ukuran dan kemiringan pijakan dan tanjakan dengan lebar yang memadai.	1. Harus memiliki dimensi pijakan dan tanjakan yang berukuran seragam. 2. Harus memiliki kemiringan tangga kurang dari 60° 3. Tidak terdapat tanjakan yang berlubang yang dapat membahayakan pengguna tangga. 4. Harus dilengkapi dengan pegangan rambat (handrail) minimum pada salah satu sisi tangga. 5. Pegangan rambat harus mudah dipegang dengan ketinggian 65 - 80 cm dari lantai, bebas dari elemen konstruksi yang mengganggu, dan bagian ujungnya harus bulat atau dibelokkan dengan baik ke arah lantai, dinding atau tiang. 6. Pegangan rambat harus ditambah panjangnya pada bagian ujung-ujungnya (puncak dan bagian bawah) dengan panjang minimal 30 cm. 7. Untuk tangga yang terletak di luar bangunan, harus dirancang sehingga tidak ada air hujan yang menggenang pada lantainya.
		Ukuran dan Detail Penerapan Standar	



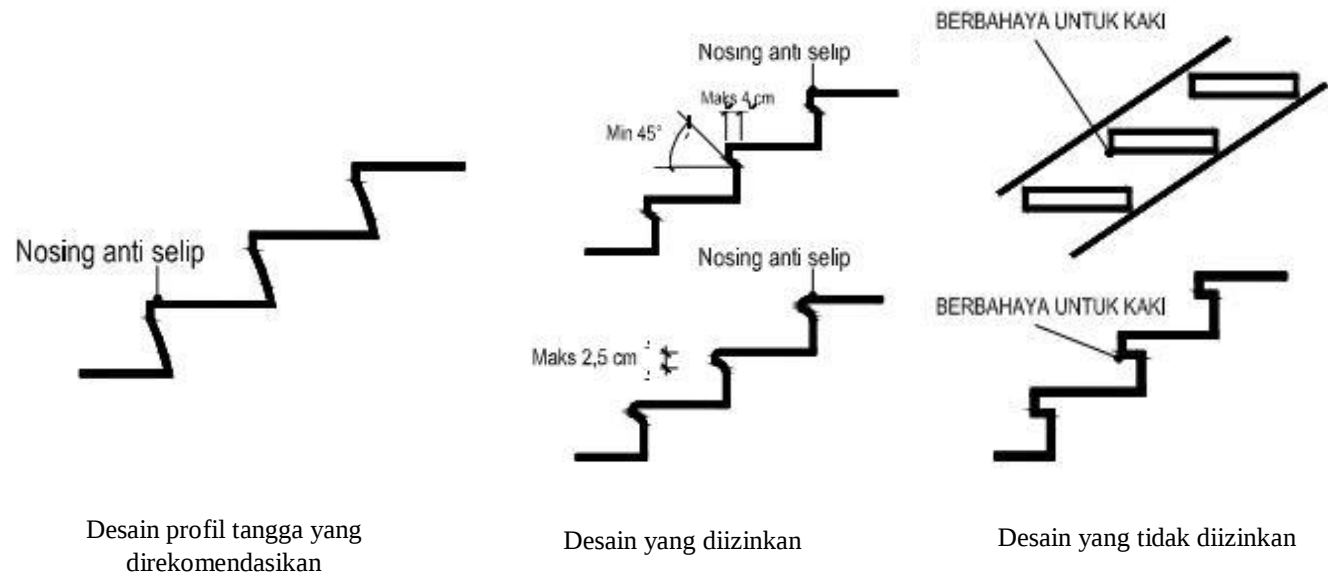


Tipikal tangga



Handrail pada tangga





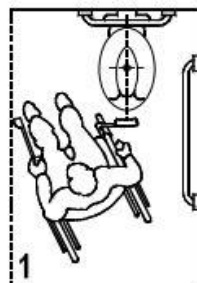
Gambar 11. Tangga



8	Toilet	Fasilitas sanitasi yang aksesibel untuk semua orang, termasuk penyandang cacat dan lansia pada bangunan atau fasilitas umum lainnya.	1. Toilet atau kamar kecil umum yang aksesibel harus dilengkapi dengan tampilan rambu/symbol dengan sistem cetak timbul "Penyandang Cacat" pada bagian luarnya. 2. Toilet atau kamar kecil umum harus memiliki ruang gerak yang cukup untuk masuk dan keluar pengguna kursi roda. 3. Ketinggian tempat duduk kloset harus sesuai dengan ketinggian pengguna kursi roda sekitar 45-50 cm. 4. Toilet atau kamar kecil umum harus dilengkapi dengan pegangan rambat/handrail yang memiliki posisi dan ketinggian disesuaikan dengan pengguna kursi roda dan difabel yang lain. 5. Semua kran sebaiknya dengan menggunakan sistem pengungkit dipasang pada wastafel, dll. 6. Bahan dan penyelesaian lantai harus tidak licin. 7. Pintu harus mudah dibuka dan ditutup untuk memudahkan pengguna kursi roda. 8. Kunci-kunci toilet atau grendel dipilih sedemikian sehingga bisa dibuka dari luar jika terjadi kondisi darurat.
Ukuran dan Detail Penerapan Standar			



75 cm 45 cm



1
Persiapan pindah badan,
ayunkan kaki, pasang
rem kursi roda



2
Pindahkan sandaran
lengan, pindahkan badan



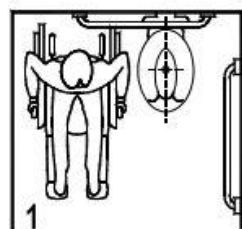
3
Pindahkan kursi roda
menjauh, ubah posisi
badan



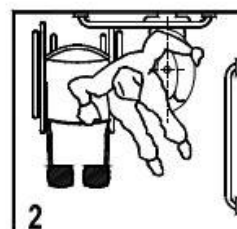
4
Tempatkan badan, diatas
toilet, lepaskan rem
kursi roda

A. PENDEKATAN DIAGONAL

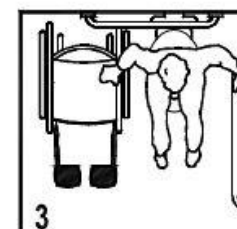
105 cm 45 cm



1
Persiapan pindah badan,
pindahkan sandaran lengan
pasang rem kursi roda



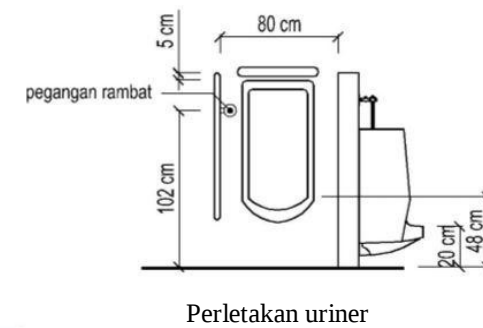
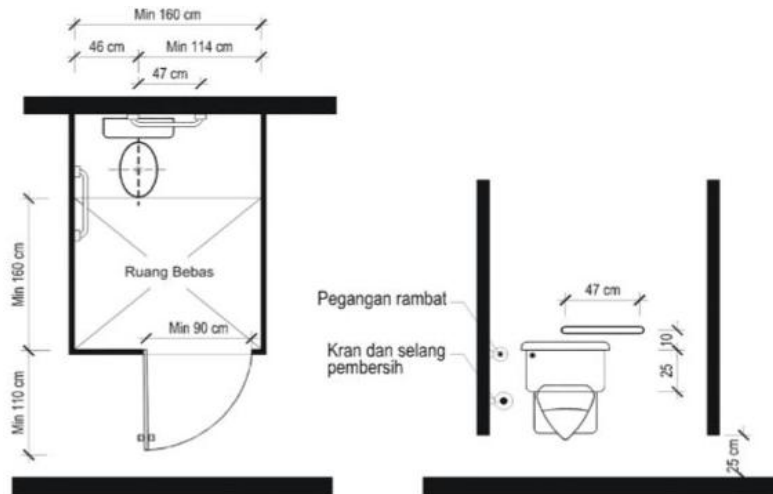
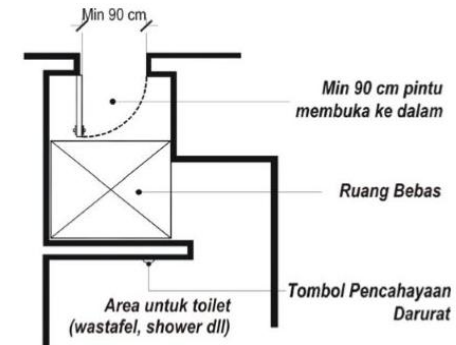
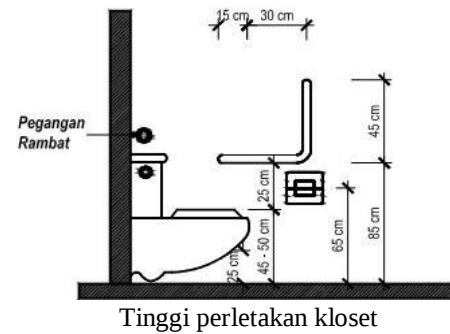
2
Pindahkan lengan



3
Tempatkan badan diatas
toilet

B. PENDEKATAN SAMPING





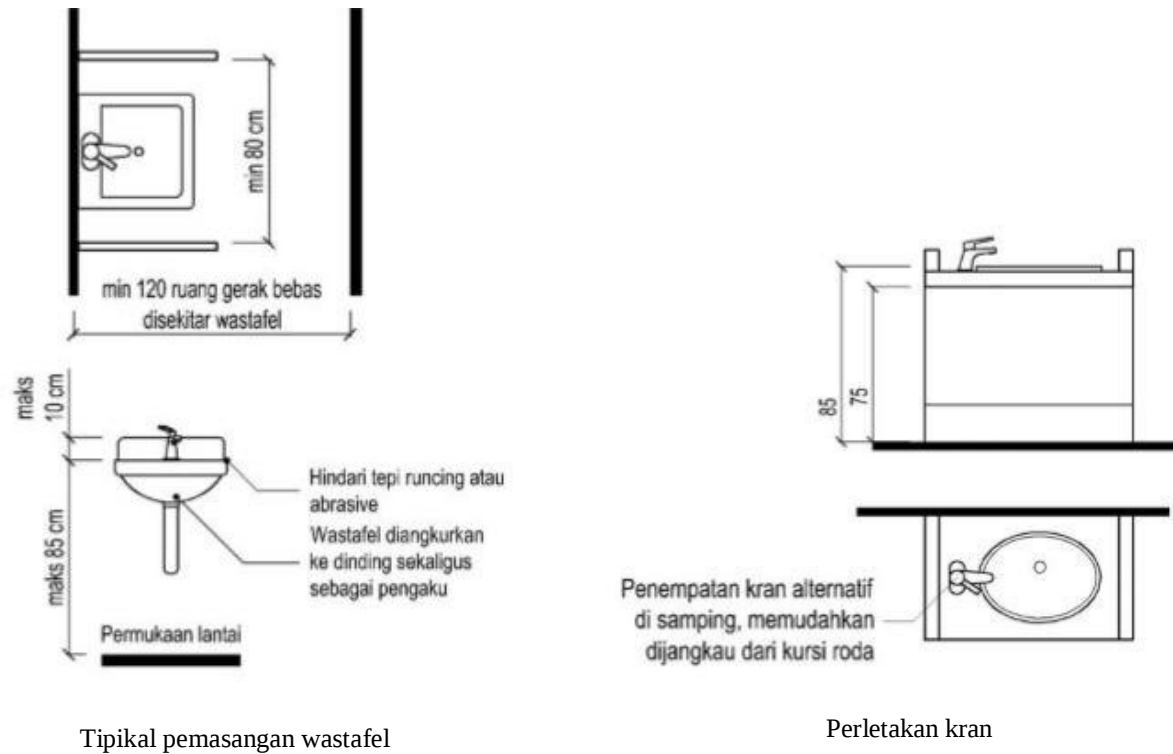
Sumber: 12. Analisa ruang gerak dalam toilet



No. 1	Elemen Amatan 2	Esensi 3	Persyaratan 4
9	Wastafel	Fasilitas cuci tangan, cuci muka, berkumur atau gosok gigi yang bisa digunakan untuk semua orang.	a. Wastafel harus dipasang sedemikian sehingga tinggi permukaannya dan lebar depannya dapat dimanfaatkan pengguna kursi roda. b. Ruang gerak bebas yang cukup harus disediakan di depan wastafel. c. Wastafel harus memiliki ruang gerak di bawahnya sehingga tidak menghalangi lutut dan kaki pengguna kursi roda. d. Pemasangan ketinggian cermin diperhitungkan terhadap pengguna kursi roda. e. Menggunakan kran dengan sistem pengungkit.

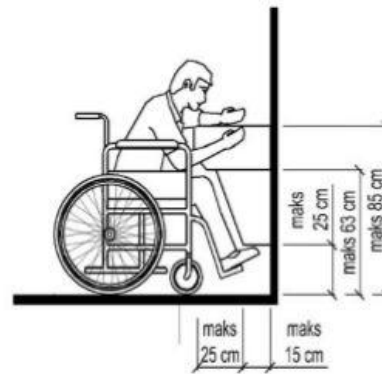


Ukuran dan Detail Penerapan Standar

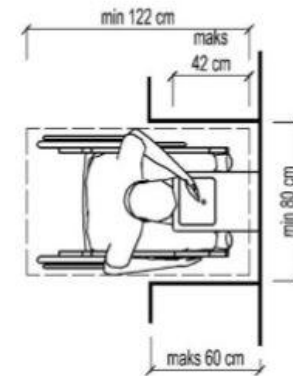


Gambar 13. Perletakan wastafel

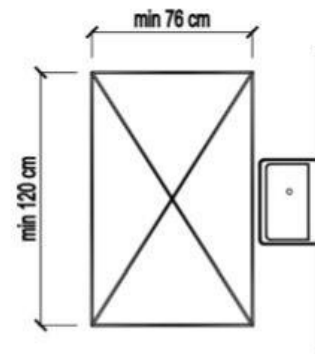




A. RUANG BEBAS VERTIKAL



B. RUANG BEBAS MENDATAR



C. RUANG BEBAS WASTAFEL

Gambar 14. Ruang bebas area wastafel



E. Anjungan Pantai Losari sebagai Ruang Publik Kota Makassar

Perkembangan pembangunan Kota Makassar belakangan ini sangat pesat, hal ini dapat dilihat dari perubahan yang terjadi diberbagai sudut kota anging mammiri ini serta adanya pembangunan ruang publik. Ruang publik Anjungan Pantai Losari merupakan salah satu ruang publik yang ada di Kota Makassar.

Anjungan Losari tidak serta merta ada. Losari adalah sebuah bentang garis pantai di sisi Barat Makasar. Dahulu, di sepanjang garis pantai ini berderet warung-warung. Bahkan, ada yang menyebutnya sebagai restoran terpanjang di dunia. Dalam perjalanan waktu, para pedagang dipindahkan. Hadirlah anjungan Losari. Sebuah proyek besar membangun anjungan di sepanjang garis pantai ini, sehingga terbentuk 4 buah pelataran Anjungan dimana terdapat penanda pada masing-masing anjungan, yaitu sebuah tulisan besar yang dipasang di bagian tepinya.

Pelataran Anjungan berbahan beton sepanjang kurang lebih 1 km tepian Pantai Losari terdiri dari 4 buah anjungan yaitu Anjungan Toraja-Mandar, Anjungan Pantai Losari, Anjungan Bugis-Makassar, dan Anjungan Metro.

Anjungan Toraja-Mandar berada paling utara dari kawasan Pantai Losari, yang menjadi salah satu khas dari Anjungan ini adalah tulisan “CITY OF MAKASSAR” diantara tulisan beton “TORAJA” dan “MANDAR”. Disain anjungan ini dibangun dengan pola busur atau setengah lingkaran, dan dengan dilengkapi bangunan atau patung yang mencirikan suku Toraja dan Mandar seperti misalnya pada pelataran Anjungan Toraja terdapat miniature rumah adat Toraja yaitu Tongkonan, patung *tedong bonga* (kerbau belang) dan patung perempuan penari yang menggunakan pakaian adat Toraja. Sedangkan pada pelataran Anjungan Mandar terdapat patung *pa'tenun*. Patung Pa'tenun merupakan simbol bahwa suku mandar terkenal dengan sarung sutra mandar atau lebih dikenal dengan *lipa' sabbe* dan patung miniature perahu *sandeq*, yang an bukti sejarah ketangguhan masyarakat suku Mandar mengarungi



Anjungan Pantai Losari, Pelataran ini merupakan spot favorit pengunjung untuk mengabadikan momennya bila berkunjung ke Pantai Losari. Disain anjungan ini juga hampir menyerupai Anjungan Toraja-Mandar dengan pola busur atau setengah lingkaran. Anjungan Pantai Losari dengan berbagai pagelaran kegiatan baik event seni dan budaya maupun kampanye politik telah menjadikan Losari sebagai simbol perkembangan Makassar.

Anjungan Bugis-Makassar, ciri khas anjungan ini juga terdapat tulisan “CITY OF MAKASSAR” berwarna merah terbuat dari beton diantara tulisan “BUGIS” dan “MAKASSAR”. Tak jauh dari pelataran berdiri kokoh Masjid Amirul Mukminin atau yang lebih dikenal dengan Masjid Amirul Mukminin.

Anjungan Metro Losari merupakan pelataran paling selatan dari kawasan Pantai Losari, yang berbeda dari anjungan ini yaitu disain pelatarannya seperti pola-pola mata gergaji atau berbentuk segitiga serta terdapat 20 patung tarso para pahlawan dan tokoh terkenal di Sulawesi Selatan.

Keberadaan Anjungan di Pantai Losari telah menggambarkan sejarah melalui patung-patung tokoh, raja dan pahlawan yang pernah ada dalam sejarah Makassar. Anjungan Pantai Losari juga telah menunjukkan kearifan lokal melalui paraga, phinisi dan becak. Ditambah dengan keberadaan sebuah mesjid yang menjadi simbol kebesaran Islam di Makassar. Ikon atau simbol itulah sebenarnya bukan hanya sekedar pencitraan dan penghormatan, tetapi hendaknya dijadikan renungan atas sebuah perjuangan masa lampau dan kearifan lokal yang semestinya dijadikan sebagai relasi abstrak yang berkesinambungan pada kondisi saat ini.

Menilik fungsinya kawasan Anjungan Pantai Losari sudah cocok digunakan sebagai ruang publik. Beberapa fasilitas di kawasan Losari cukup mendukung kenyamanan pengunjung. Misalnya, tersedia tempat duduk di beberapa titik, space untuk pengunjung yang lebih besar dari space untuk parkir kendaraan, pintu akses yang lapang serta view tanpa batas ke arah barat untuk menikmati panorama



Fenomena yang terjadi bahwa isu tentang ketersediaan aksesibilitas yang ada di kawasan Anjungan Pantai Losari saat ini tampak belum aksesibel bagi difabel, Berbagai hambatan arsitektural pada bangunan dan fasilitas-fasilitas yang disediakan bagi kepentingan umum ini tidak mudah atau bahkan sering tidak memungkinkan untuk diakses bagi difabel. Dengan demikian keadaan ini mengakibatkan diskriminasi dimana difabel tidak dapat memperoleh kesamaan hak dalam menikmati fasilitas publik.

Merujuk pada Peraturan daerah Kota Makassar No. 6 tahun 2013 tentang pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, dimana pemerintah dan masyarakat berkewajiban sama dalam menghormati hak-hak penyandang disabilitas dengan memberikan aksesibilitas yang nyaman, maka dalam mewujudkan konsep kesamaan hak tersebut sangatlah penting dilakukan evaluasi terhadap aksesibilitas pada fasilitas yang ada saat ini.

F. Posisi Penelitian Terhadap Penelitian Terdahulu

Penelitian ini menggunakan penelitian terdahulu sebagai acuan dari segi metode ataupun teori pendukung lainnya. Penelitian terdahulu merupakan kumpulan dari hasil-hasil peneliti sebelumnya dalam kaitannya dengan topik yang akan diteliti. Dibawah ini akan dirincikan penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

Nama : Hasrydha
Tahun : 2017
Judul : Evaluasi Aksesibilitas di Anjungan Pantai Losari Kota Makassar
Fokus Amatan : Jalur pemandu, rambu dan marka, area parkir, ram, tangga, toilet, tempat duduk.
Metode Penelitian : Kualitatif

Adapun perbedaan pada penelitian sebelumnya, penelitian ini adalah evaluasi terhadap kinerja aksesibilitas pada fasilitas di Anjungan Pantai Losari sebagai publik yang mampu mengakomodasi seluruh penggunaannya dengan analisis kesesuaian kondisi yang ada dengan teori atau standar peraturan yang dikeluarkan dengan studi pustaka dan observasi, dan mengidentifikasi



permasalahan yang dihadapi pengguna kursi roda dan tuna netra dalam mengakses kawasan Anjungan Pantai Losari yang didapat melalui pengamatan dan wawancara. Kemudian dirumuskan arahan penyediaan fasilitas dan aksesibilitas yang sesuai dengan prinsip-prinsip *Universal Design* di Anjungan Pantai Losari sebagai ruang publik kota Makassar agar dapat mewujudkan kesamaan kesempatan hidup.



Tabel 2. Penelitian Sejenis Yang Relevan

No.	Nama	Keterangan/Sumber	Judul	Tujuan	Elemen amanat	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Nasruddin Dewang	Jurnal, Universitas Esa, Jakarta, 2010	Aksesibilitas Ruang Publik Bagi Kelompok Masyarakat tertentu (Studi Fasilitas Publik Bagi Kaum Difabel Di Kawasan Taman Suropati Menteng- Jakarta Pusat).	Merumuskan upaya serta rumusan konsep untuk mengefektifkan pelaksanaan penyediaan aksesibilitas bagi kaum difabel pada ruang terbuka publik di Kawasan Taman Suropati Menteng Jakarta Pusat	• Pedestrian • Jogging track • Ramp • Bangku • Parkir • Pintu • Penyebrangan Berupa Zebra Cross	Kualitatif, deskriptif	Kondisi fisik fasilitas di kawasan taman Suropati yang cukup lengkap dan memadai tetapi tidak semuanya dalam kondisi yang baik/terawat. Salah satu persoalan hal tersebut terjadi karena kurangnya kesadaran aparat/instansi pemerintah untuk mempertimbangkan kepentingan para difabel dalam merencanakan ruang terbuka publik.
2	Riestya A. W, dkk	Jurnal, Universitas Diponegoro, Semarang, 2013	Studi Penerapan <i>Universal Design</i> Pada gedung Baru Unit Rehabilitasi Medik RS. Dr. Kariadi Semarang	Merumuskan kesesuaian aksesibilitas pada gedung baru unit rehabilitasi medik Rumah Sakit Dr. Kariadi Semarang terkait penerapan Universal Design.	• Entrance door • Lobby, • Ruang-ruang • Administrasi • Tangga • Pintu • Koridor	Kuantitatif	Dengan memperluas parameter akomodasi dari ketentuan normal, dengan ketentuan tambahan yang khusus pada tempat yang dibutuhkan. Tujuan sebenarnya dari seorang arsitek yaitu untuk membuat bangunan nyaman mungkin bagi semua penggunaanya, sehingga dapat menghindari diskriminasi arsitektural.

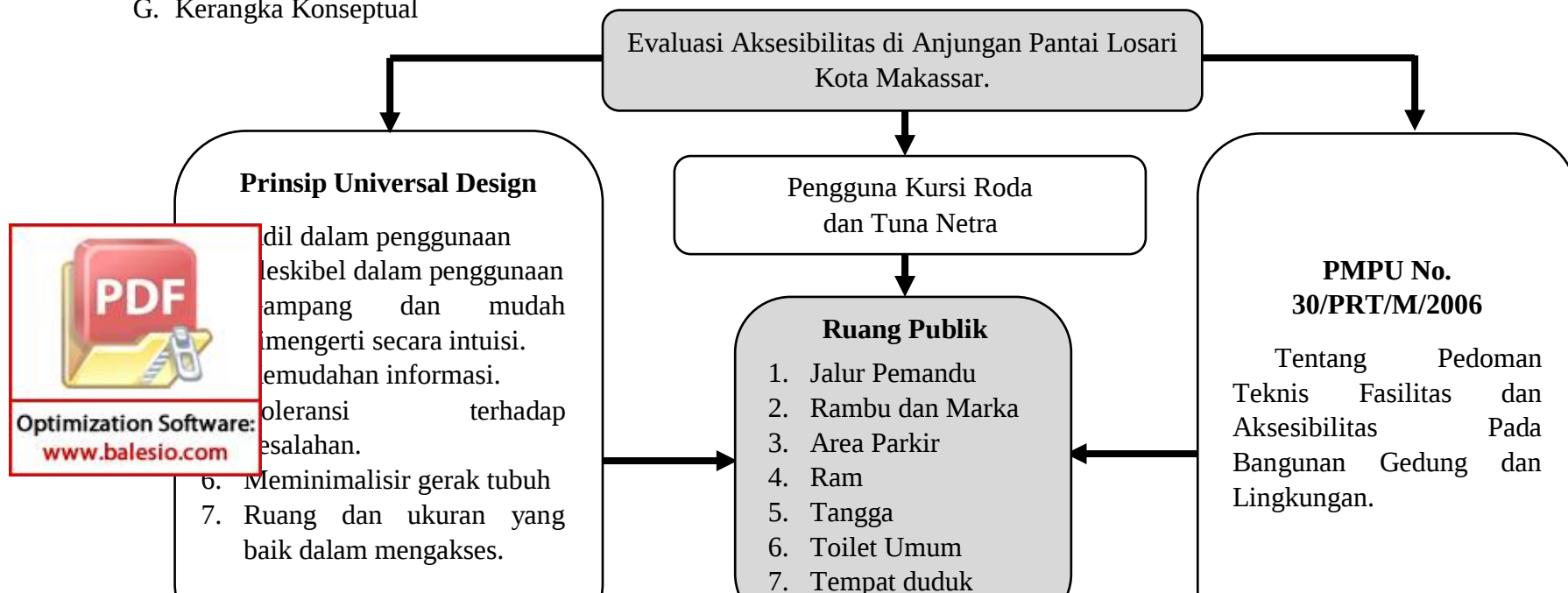


3	Fika Masruroh, dkk	Jurnal, Universitas Muhammadiyah, Jakarta, 2015	Kajian Arsitektural Taman Yang Mengakomodasi Aksesibilitas Difabel Studi Kasus Taman Tribeca Central Park Mall, Taman Menteng Dan Taman Ayodi	Menganalisa bagaimana implementasi 7 Prinsip Universal Design dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 30/PRT/M/2006 tentang pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan pada Taman Tribeca, Taman Menteng, dan Taman Ayodia.	• Pintu masuk • Jalur Pedestrian • Vegetasi • Area Parkir • Bangku taman • Drainase • Toilet • Tempat Sampah • Signage	Kualitatif	Secara umum ketiga taman yang menjadi objek studi kasus masih belum mengakomodasi aksesibilitas difabel. Tunanetra adalah difabel yang paling sering mengalami kesulitan berkegiatan di ketiga taman dan tidak diakomodasi aksesibilitasnya



4	Harry Kurniawan	Jurnal, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2014	Implementasi Aksesibilitas Pada Gedung Baru Perpustakaan UGM	Implementasi aksesibilitas fisik pada Gedung baru Perpustakaan UGM direncanakan dan dirancang untuk menjamin aktivitas pengunjung mulai dari luar bangunan hingga ke setiap fungsi di dalam bangunan. Hal ini perlu dilakukan untuk menjaga kualitas perancangan aksesibilitas tetap sesuai dengan konsep awal perencanaan aksesibilitas di Gedung ini.	Sistem sirkulasi • Ramp • Tangga • Lift Sistem Informasi • Tactile map • Meja informasi Fasilitas Penunjang • Toilet • Wastafel	Kualitatif	Sistem sirkulasi dan sistem informasi adalah dua system yang sangat penting dalam menjamin kelancaran dan kemudahan mobilitas dan aktivitas terutama bagi penyandang difabilitas.
---	-----------------	---	--	---	---	------------	---

G. Kerangka Konseptual



Bagan 2. Kerangka Konseptual
Sumber: Analisis Penulis, 2017

